



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025



**DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2026**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
KATA PENGANTAR	v
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Isu-isu Strategis	2
1.3 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran	4
1.4 Sistematika Penulisan	6
1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2025	7
1.6 Tindak Lanjut atas Rekomendasi LKjIP Tahun 2024	8
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD	9
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	10
2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025	12
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	19
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	21
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	23
3.2 Realisasi Anggaran	51
3.3 Inovasi	53
3.4 Penghargaan	55
 BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	57
4.2 Rekomendasi	58
 LAMPIRAN	
Perjanjian Kinerja 2025	
RKT 2025	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 : Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2025	7
Tabel 1.2 : Tindak Lanjut atas Rekomendasi LKjIP Tahun 2024	8
Tabel 2.1 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	9
Tabel 2.2 : Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	11
Tabel 2.3 : Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	12
Tabel 2.4 : Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	13
Tabel 2.5 : Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	20
Tabel 3.1 : Skala Pengukuran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	23
Tabel 3.2 : Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	24
Tabel 3.3 : Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	25
Tabel 3.4 : Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dari Tahun 2023 - 2025	27
Tabel 3.5 : Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra 2029	28
Tabel 3.6 : Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja	29
Tabel 3.7 : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	32
Tabel 3.8 : Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	33
Tabel 3.9 : Rincian Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	42
Tabel 3.10 : Ringkasan Penggunaan Anggaran Tahun 2025	52
Tabel 3.11 : Sebaran Kios Pangan Murah di Kab/Kota se Jawa Tengah	54

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 : ASN Berdasarkan Golongan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	5
Gambar 2.1 : Instrumen Pendukung Capaian Kinerja DISHANPAN Tahun 2025	21
Gambar 3.1 : Penerimaan Penghargaan Blankon Award Tahun 2025	51
Gambar 3.2 : Penerimaan Penghargaan untuk Provinsi dengan capaian penurunan angka Prevalence of Undernourishment (PoU) Terbaik III Tahun 2024	56
Gambar 3.3 : Penerimaan Penghargaan Juara 2 Kategori Belanja Non Tunai Terbaik Tahun 2025	56

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2023.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Strategis 2024 – 2026 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Ungaran, Januari 2026

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH



Ir. DYAH LUKISARI, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19661016 199203 2 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Perda No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, dimana pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan (Pasal 2). Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Guna optimalisasi kebijakan Pangan serta optimalisasi pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang kebijakan Pangan di Provinsi Jawa Tengah, maka diterbitkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas dan Badan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Entitas Akuntabilitas Kinerja tersebut menyelenggarakan SAKIP secara berjenjang, dengan tingkatan mulai dari satuan kerja, unit organisasi, hingga kementerian/lembaga.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format LKj pada dasarnya menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan termasuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Hal terpenting dalam penyusunan LKj adalah pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya LKj, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang.

LKj Dinas Ketahanan Pangan (DISHANPAN) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 disusun untuk memberi gambaran penyelenggaraan program dan kegiatan ketahanan pangan Provinsi Jawa Tengah sebagai pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada DISHANPAN. LKj ini juga disusun sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah dalam mengevaluasi program dan kegiatan tahun 2025 serta sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah.

1.2 Isu-isu Strategis

Ketahanan pangan merupakan pilar strategis dalam pembangunan daerah karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, stabilitas sosial, serta pertumbuhan ekonomi. Dalam penyelenggaraan pangan tentunya Pemerintah Jawa Tengah harus mengondisikan wilayahnya untuk menjadi tahan pangan.

Berbagai permasalahan pembangunan ketahanan pangan yang dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari perumusan isu strategis pembangunan ketahanan pangan. Perumusan selain mengacu pada Badan Pangan Nasional, pemilihan isu strategis juga memperhatikan kondisi di Jawa Tengah, dengan mempertimbangkan pengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan ketahanan pangan provinsi Jawa Tengah, merupakan tugas dan tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat berdasarkan pada prinsip Aktual, Problematik, Khalayak dan Layak (APKL) serta berdasarkan prioritas mendesak, serius dan bila tidak ditangani akan menjadi masalah (*Urgent, Serious and Growth*).

Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Ketersediaan pangan

Isu ketersediaan pangan yang bergantung pada produksi, perlu mendapatkan perhatian. Walaupun produksi pangan Jawa Tengah secara umum mengalami pertumbuhan positif namun belum semua pangan tersedia secara cukup dan merata dari hasil produksi Jawa Tengah. Kekurangan ketersediaan masih terjadi pada antara lain pada komoditas kedelai sehingga sampai saat ini kebutuhan masih harus ditutup dari impor.

Meskipun ketersediaan pangan pokok beras di Jawa Tengah surplus, lebih dari jumlah yang dibutuhkan oleh masyarakat Jawa Tengah. Namun ketersediaan tersebut tidak merata sepanjang tahun, hal itu disebabkan karena pola tanam padi. Untuk pemenuhan kebutuhan agar tercukupi sepanjang tahun perlu adanya pengelolaan stok beras.

Ketersediaan pangan semakin menarik perhatian mengingat lahan pertanian sebagai salah satu faktor produksi pangan, luasnya semakin terbatas. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial. Di sisi lain, dalam hal ganti rugi atas alih fungsi lahan pertanian hanya dilihat dari sudut harga lahan yang dialihfungsikan belum

memperhatikan seberapa investasi atas lahan yang ada.

2. Cadangan Pangan

Isu cadangan pangan sangat penting untuk ditangani. Adanya tantangan iklim ekstrem memicu terjadinya bencana dan pergeseran masa tanam yang berpengaruh terhadap ketersediaan pangan. Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan penguatan cadangan pangan, baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat agar pangan dapat tersedia sepanjang waktu.

3. Distribusi Pangan

Isu ini diperlukan dalam perumusan kebijakan terkait distribusi pangan. Kebijakan tersebut antara lain terkait intervensi yang perlu dilakukan ketika terjadi kelangkaan pasokan, gejolak harga dan gangguan akses pangan. Stabilitas harga pangan akan menguatkan posisi tawar petani dan menjamin akses pangan masyarakat. Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi juga menjadi isu penting karena sebagai jembatan yang menghubungkan produsen dengan konsumen. Ketidaklancaran proses distribusi akan mengakibatkan biaya pemasaran yang mahal dan kerusakan komoditas pertanian. Selain itu panjangnya rantai pemasaran menyebabkan peningkatan nilai tambah yang seharusnya diterima oleh petani berkurang.

4. Kerawanan Pangan

Potensi kerawanan pangan di Jawa Tengah masih cukup tinggi diakibatkan kemiskinan, terbatasnya infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumber daya yang rendah dan seringnya terjadi bencana alam. Masih kurangnya kesiapan pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan atas terjadinya kerawanan pangan. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya cadangan pangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan cadangan pangan pemerintah.

5. Konsumsi pangan masyarakat.

Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masih rendah yang ditunjukkan dengan angka Pola Pangan Harapan (PPH). Kondisi tersebut tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan panganekaragaman konsumsi pangan karena keterbatasan ekonomi, pengetahuan dan kesadaran pangan dan gizi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yang masih terbatas, kecenderungan proporsi konsumsi pangan berbahan baku lokal dan berkembangnya globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis impor. Peningkatan panganekaragaman konsumsi pangan masyarakat dilaksanakan dengan tidak membedakan jenis kelamin dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat sesuai di wilayahnya.

6. Stunting

Stunting merupakan kondisi gagal pertumbuhan pada anak (pertumbuhan tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Kekurangan gizi dalam waktu lama itu terjadi sejak janin dalam kandungan sampai awal kehidupan anak (1000 Hari Pertama Kelahiran). Penyebabnya karena rendahnya akses terhadap makanan bergizi, rendahnya asupan vitamin dan mineral, dan buruknya keragaman pangan dan sumber protein hewani. Masalah stunting atau anak yang

kerdil tentu akan berdampak buruk bagi kehidupan anak, termasuk gangguan sistem kekebalan tubuh, gagal tumbuh, masalah fungsi otak dan perkembangan organ, rentan infeksi, gangguan fisik dan mental, serta mengancam produktivitas dan fungsi hidup di masa depan.

7. *Food Loss and Waste*

Food loss atau susut pangan adalah bahan pangan yang terbuang dalam rantai pasok dari petani ke pasar. Ini bisa terjadi akibat distribusi dan pengemasan yang tidak baik hingga membuat bahan pangan rusak dan tidak bisa dijual. Sementara, *food waste* atau limbah pangan terjadi di tingkat pasar ritel hingga di tingkat konsumen. Pangan terbuang akibat tidak laku ataupun penyalahgunaan di rumah tangga. *Food loss* dan *food waste* Indonesia itu terbesar ke-3 di dunia setelah Arab Saudi dan Amerika Serikat. Menurut Laporan Bappenas 2021, *food loss* dan *food waste* Indonesia selama 2000 – 2019 mencapai 150 – 184 kg per kapita pertahun yang harusnya bisa memberi makan 30% – 40% populasi.

8. Keamanan Pangan Segar

Saat ini masih cukup banyak digunakan kasus gangguan kesehatan akibat pangan yang tidak aman karena terpapar oleh cemaran secara biologi, fisik maupun penggunaan bahan kimia yang berlebihan maupun yang dilarang serta masih ditemukannya pangan kadaluwarsa yang beredar di masyarakat. Merebaknya kasus keracunan pangan segar akibat kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat konsumen maupun produsen (khususnya industri kecil dan menengah) terhadap keamanan pangan segar juga perlu untuk ditangani. Belum ada sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan keamanan pangan segar juga memerlukan usaha-usaha untuk pencegahan dan pengendalian keamanan pangan segar.

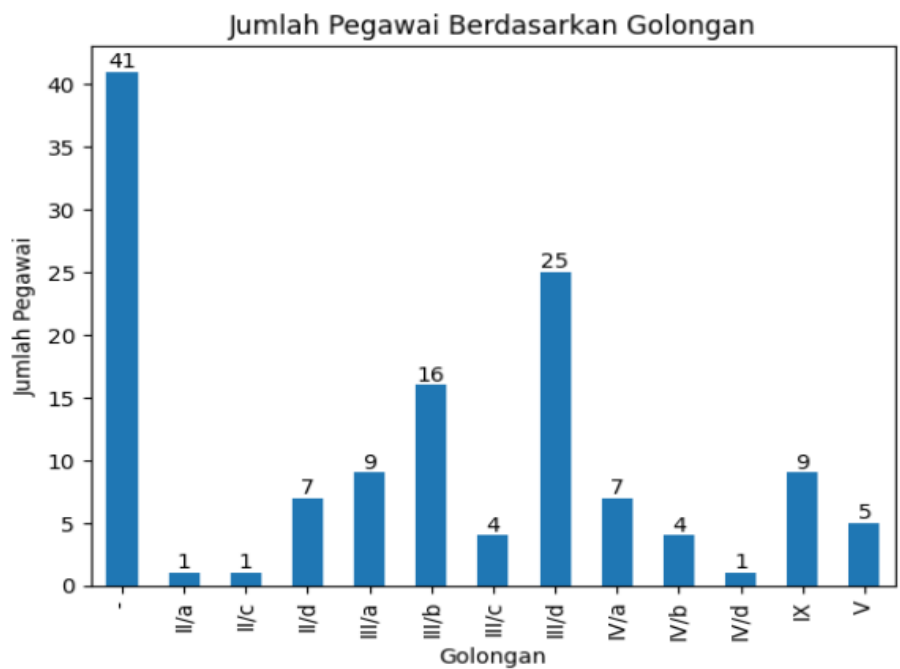
9. Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)

Diterbitkannya Permentan Nomor 53/Permentan/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan), yaitu bahwa produk PSAT yang diperdagangkan dalam bentuk kemasan harus memiliki nomor register. Hal tersebut menjadi tantangan Dinas Ketahanan Pangan melalui OKKP-D dalam hal sertifikasi jaminan mutu pangan, baik dalam hal sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan fasilitas.

1.3 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah didukung oleh kekuatan sumber daya manusia sebanyak 130 orang. Terdiri dari 7 pejabat eselon, yaitu: 1 orang pejabat eselon II, 3 orang pejabat eselon III, 3 orang eselon IV dan 51 jabatan fungsional umum serta 72 orang jabatan fungsional khusus yang berdasarkan kepangkatan dan golongan terinci sebagai berikut (Gambar 1.1).

Gambar 1.1
ASN Berdasarkan Golongan
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025



Peningkatan kualitas sarana dan prasarana mutlak diperlukan sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut:

1. Bangunan gedung kantor 3 (tiga) lantai di Komplek Pertanian Tarubudaya Ungaran Jawa Tengah, gedung pertemuan/aula besar kapasitas kurang lebih 150 orang, Ruang rapat kecil 2 buah dengan kapasitas masing-masing kurang lebih 30 orang dimanfaatkan untuk kegiatan koordinasi internal maupun eksternal dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas, gedung kantor gudang cadangan pangan 1 (satu), 1 (satu) gedung eks. Toko Tani Indonesia Center (TTIC), gudang cadangan pangan pemerintah 2 unit dan lantai jemur (kapasitas 10 ton GKG), 2 unit gedung laboratorium (Ungaran dan Solo), 1 unit bangunan kantor (BPMKP Solo), 1 unit aula, 1 unit musholla, 9 unit rumah dinas;
2. Personal komputer sebanyak 1 (satu) unit, 1 (satu) unit laptop, dan 3 (tiga) unit printer;
3. 12 (dua belas) jaringan mesin telepon/fax dengan perincian sebagai berikut: mesin fax 6921997; mesin telepon 6925554, 6921046, 6921972, 6923158, 6922411, 6923412, 6921159, 6925268, 6924604 dan (0271) 851375;
4. Televisi sebanyak 17 (tujuh belas) unit;
5. Sebanyak 57 (lima puluh tujuh) AC split, 5 (lima) AC floor, 2 (dua) AC cassette dan 15 (lima belas) kipas angin yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kenyamanan ruangan, dimana 8 (delapan) unit dalam kondisi rusak berat dan akan diusulkan penghapusan;
6. LCD sebanyak 16 (enam belas) unit, 6 unit dalam kondisi rusak berat dan akan diusulkan penghapusan, Camcorder DVD 1 (satu) unit;

7. Kendaraan dinas roda 4 (mobil) sebanyak 16 (enam belas) unit
8. Kendaraan roda 2 (Sepeda motor) sebanyak 16 (enam belas) unit, di mana 8 unit dalam kondisi rusak berat dan akan diusulkan penghapusan aset;
9. Rice Mill Unit (RMU) 3 (tiga) unit, dryer/pengering 1 (satu) unit, Cold Storage 1 (satu) unit
10. 2 (dua) paket masing-masing sebanyak 326 unit peralatan laboratorium (Solo dan Ungaran);
11. Alat Pemotong Kertas 2 (dua) unit; Video Conference 1 (satu) unit, kursi rapat besi 70 (tujuh puluh), kursi eselon 5 (lima), televisi 4 (empat), dispenser 3 (tiga), bracket TV 3 (tiga), meja rapat 31 (tiga puluh satu), meja rapat pimpinan 2 (dua), genset kapasitas 140 KVA 1 (satu), UPS computer 3 (tiga), pallet plastik 30 (tiga puluh), router 1 (satu) set, Lemari es 1 (satu), Camera digital 1 (satu), CCTV 2 paket, Drone 1 (satu), Kursi putar staf 23 (dua puluh tiga), kursi hadap 2 (dua), Sound system gedung pertemuan baru 1 (satu) paket, Microphone kabel 2 (dua), microphone wireless 2 (dua), Sound system podcast 1 (satu) paket
12. Pada BPMKP terdapat Filling Cabinet 1 (satu), Vacuum Cleaner 1 (satu), AC split 4 (empat), UPS 10.000 VA Laboratorium BPMKP 1 (satu), Compressor Swan 1 (satu), Hand Blander Philips 1 (satu), Graphite Furnace 1 (satu), Lemari Pendingin/Kulkas 2 Pintu Samsung 1 (satu), Testing Milling Crown CTM-18 1 (satu), Micropipet 100-1000ul 1 (satu), Peralatan Laboratorium Set Toolkit 1 (satu), Rak Pengering Glassware 1 (satu).

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dituangkan dalam 4 (empat) program yaitu: Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat sebesar Rp. 17.507.560.000,- , Program Penanganan Kerawanan Pangan sebesar Rp. 7.055.935.000,- , Program Pengawasan Keamanan Pangan sebesar Rp. 778.865.000,- , dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan sebesar Rp. 18.671.487.000,- .

1.4 Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Permenpan No. 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang perlunya LKjIP yang diawali dengan uraian singkat tentang Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Selain itu dimuat pula tentang landasan hukum penyusunan LKjIP dan aspek strategis/isu strategis, keterkaitan dengan Renstra dan RPD Provinsi Jawa Tengah.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Dalam bab ini berisi Tujuan dan Sasaran yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi misi pembangunan jangka menengah dilengkapi dengan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini memuat penjelasan capaian kinerja program dan kegiatan organisasi beserta analisis capaian kinerjanya serta akuntabilitas keuangan (Realisasi Anggaran), Inovasi dan Penghargaan yang Diperoleh Instansi selama Tahun 2025.

BAB IV. PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan rekomendasi.

1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025

Hasil penilaian evaluasi kinerja internal dijelaskan bahwa proses evaluasi internal yang terdiri dari evaluasi program dan evaluasi akuntabilitas kinerja pada umumnya telah dilaksanakan dengan cukup baik. Berikut merupakan saran/rekomendasi berserta tindak lanjutnya Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah agar melakukan hal-hal sebagai berikut.

Tabel 1.1
Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	Memerintahkan kepada Kasubag Umpeg agar dalam penyusunan IKI bawahannya (IKI Tahun 2026) selaras dengan IKI atasannya dengan berpedoman pada Permenpan 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.	- Telah diterbitkan Nota Dinas nomor 000.8.6.3/2.2025 tanggal 3 Desember 2025 tentang Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025; - Telah dilaksanakan perbaikan Indikator Kinerja Individu sesuai dengan Permenpanrb nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
2.	Dalam menyusun rekomendasi Internal OPD pada dokumen LKjIP (BAB IV Tahun 2025, diharapkan dapat menjawab permasalahan/tantangan yang ditemui dalam pencapaian target kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.	- Telah dilaksanakan perbaikan pada dokumen LKJiP (Bab IV) sebagaimana terdapat dalam dokumen ini
Bukti Dukung Tindak Lanjut atas LHE SAKIP Tahun 2025 pada tautan : https://s.id/TL_SAKIP_DISHANPAN_2025		

1.6 Tindak Lanjut atas Rekomendasi LKJIP Tahun 2024

Dalam rangka meningkatkan kinerja DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah, maka telah dilaksanakan program dan kegiatan untuk menindaklanjuti atas rekomendasi LKJIP dari tahun sebelumnya. Berikut merupakan rekomendasi berserta tindak lanjutnya Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

Tabel 1.2
Tindak Lanjut atas Rekomendasi LKJIP Tahun 2024

No	Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	Subsidi Harga Pangan untuk penanganan daerah rawan pangan pada daerah dengan Prevelance of Undernourishment (PoU) tinggi di Kabupaten (Purworejo, Grobogan, Kebumen dan Banjarnegara) dan penanganan stunting di daerah dengan angka stunting tinggi di Kabupaten (Pemalang, Brebes, Banyumas dan Magelang).	- Pelaksanaan Subsidi Harga Pangan untuk penanganan daerah rawan pangan dengan konsep Subsidi Harga Pangan Sumber Energi kepada Masyarakat Rawan Pangan dan Gizi Tahun 2025 yang berada pada 7 Kabupaten dengan tingkat PoU tinggi yaitu Banjarnegara, Grobogan, Kebumen, Purworejo, Pati, dan Tegal; - Pelaksanaan Intervensi Desa Stunting dilaksanakan melalui Subsidi Harga Pangan Sumber Energi kepada Keluarga dengan Anak Berisiko Stunting kepada 1.771 balita <i>underweight</i> di 8 Kabupaten dengan angka stunting tinggi antara lain Kab. Wonosobo, Kab. Magelang, Kab. Brebes, Kab. Pemalang, Kab. Banyumas, Kab. Klaten, Kab. Kendal, Kab. Purbalingga.
2.	Subsidi harga pangan untuk Produsen dan Konsumen guna untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan di daerah yang mengalami inflasi.	- Pelaksanaan subsidi harga pangan untuk produsen dan konsumen dilaksanakan di 35 Kabupaten / Kota di Jawa Tengah dengan 12 Komoditas Pangan Strategis dengan realisasi penyaluran 100% tersalurkan.
3.	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) melalui pengadaaan cadangan pangan provinsi.	- Pengelolaan CPPD Provinsi Jawa Tengah total 658.669 kg setara beras atau 88,16% dari target yang telah ditentukan untuk tahun 2025 sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 - Pengadaan Tahun 2025 sebesar 697 ton
Bukti Dukung Tindak Lanjut atas LHE SAKIP Tahun 2025 pada tautan : https://s.id/TL_LKJIP_DISHANPAN_2025		

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

1. Tujuan

Mewujudkan ketahanan pangan Jawa Tengah dan Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah.

2. Sasaran

Dalam rangka mencapai hasil yang akan dicapai dari tujuan yang telah ditetapkan dimaksud, maka sasaran yang akan dicapai dalam rentang waktu tiga tahun ke depan yaitu meningkatnya ketersediaan pangan, meningkatnya keterjangkauan/akses pangan, meningkatnya pemanfaatan pangan, meningkatnya kualitas manajemen risiko perangkat daerah dan meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran agar dapat diformulasikan secara terukur, spesifik dan mudah dicapai dan rasional yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan, maka diperlukan indikator dan target kinerja sasaran sebagai tolok ukur untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian setiap sasaran yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah rencana kinerja pelayanan jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan dalam tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kinerja Pelayanan
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun Ke-		
			2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Mewujudkan Ketahanan Pangan Jawa Tengah		Indeks Ketahanan Pangan	82,73	82,74	82,75
	Meningkatkan Keterjangkauan / akses pangan	Persentase Penanganan Kecamatan Rawan Pangan	5	6	7
	Meningkatkan Pemanfaatan Pangan	Skor PPH Provinsi	94,5	94,6	94,7
	Meningkatkan Keterjangkauan / Akses Pangan	Rata-Rata Deviasi Harga Pangan Strategis (Beras)	10	10	10
	Meningkatkan Ketersediaan Pangan	Angka Kecukupan Energi	3.797	3.801	3.803
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	82	83	84
	Meningkatnya	Indeks Kepuasan	82	83	84

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun Ke-		
			2024	2025	2026
	kualitas pelayanan perangkat daerah	Masyarakat			
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko	2,94	2,95	2,96

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah adalah mewujudkan ketahanan pangan Provinsi Jawa Tengah, dengan indikator tujuan Indeks Ketahanan Pangan (IKP). Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu negara atau wilayah memiliki ketahanan pangan yang baik. Ketahanan pangan mencakup kemampuan untuk menyediakan pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat (maksimal 100). Tujuan non urusan yang berkaitan dengan kesekretariatan yaitu meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah).

Sasaran Dinas Ketahanan Pangan adalah meningkatnya ketersediaan yang ditunjukkan dengan indikator angka kecukupan energi (Kkal/kapita/hari); meningkatnya keterjangkauan/akses pangan yang ditunjukkan dengan indikator rata-rata deviasi harga pangan strategis (beras) dan persentase penanganan kecamatan rawan pangan; serta meningkatnya pemanfaatan pangan yang ditunjukkan dengan indikator Skor PPH Provinsi. Sasaran yang berkaitan dengan kesekretariatan, yaitu Meningkatkan kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah yang ditunjukkan dengan indikator Indeks Manajemen Risiko dan meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah yang ditunjukkan dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat.

Program Dinas Ketahanan Pangan adalah meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat yang ditunjukkan dengan indikator rata-rata ketercukupan pangan, rasio penyediaan cadangan pangan pemerintah provinsi, rasio cadangan pangan masyarakat, persentase komoditas pangan strategis dengan harga efektif sesuai ketentuan yang berlaku, rasio cadangan pangan masyarakat (DRP), angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah dan angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah (DRP); Meningkatkan penanganan kerawanan pangan yang ditunjukkan dengan indikator persentase penurunan daerah rawan pangan dan gizi; Meningkatkan pengawasan keamanan pangan yang ditunjukkan dengan indikator persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan dan persentase rekomendasi jaminan mutu dan keamanan pangan yang diterbitkan. Program yang berkaitan dengan kesekretariatan adalah penunjang urusan pemerintah daerah provinsi yang ditunjukkan dengan indikator persentase tingkat ketercapaian

kinerja perangkat daerah, persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah serta persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (BPMKP).

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan beserta indikator kinerjanya disajikan pada Tabel 2.2

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Mewujudkan Ketahanan Pangan Jawa Tengah		Indeks Ketahanan Pangan	Skor	85,47
		Meningkatkan Keterjangkauan / akses pangan	Persentase Penanganan Kecamatan Rawan Pangan	%	7
		Meningkatkan Pemanfaatan Pangan	Skor PPH Provinsi	skor	94,2
		Meningkatkan Keterjangkauan/ Akses Pangan	Rata-Rata Deviasi Harga Pangan Strategis (Beras)	%	8
		Meningkatkan Ketersediaan Pangan	Angka Kecukupan Energi	Kkal/kapita/hari	3.600
2	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	75,50
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	85
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko	Angka	2,91

Strategi dan arah kebijakan pembangunan ketahanan pangan merupakan rumusan perencanaan komprehensif berdasarkan arah kebijakan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Ketahanan Pangan disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatnya ketersediaan pangan	1. Penyediaan pangan pokok dan pangan lainnya merata antar waktu antar wilayah 2. Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan pemerintah dan	Perwujudan ketahanan pangan dan daya saing produk pangan segar asal tumbuhan melalui penguatan penerapan Sistem Logistik Daerah (SISLOGDA), penguatan cadangan pangan masyarakat, pembinaan penerapan jaminan mutu pangan dan penguatan promosi produk pangan berbasis sumber daya lokal.
2	Meningkatnya Keterjangkauan / Akses Pangan	1. Penanganan kerawanan pangan dan stunting 2. Penanganan food loss and waste 3. Pembangunan sistem distribusi yang efektif dan efisien	
3	Meningkatnya Pemanfaatan Pangan	1. Promosi pencapaian target konsumsi pangan sesuai angka kecukupan gizi berbasis sumber daya lokal 2. Pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas daerah kab/kota 3. Penguatan kapasitas dan kapabilitas laboratorium pengujian BPMK	
4	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan Perkantoran, Kepegawaian, dan keuangan administrasi pelayanan	
5	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	

2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Pada Tahun 2025, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah mendapat alokasi dana APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar 47.104.866.000,- terdiri atas Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar Rp 18.671.487.000,- dan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan sebesar Rp 28.433.379.000,-. Pada LKjIP ini melaporkan Program urusan Bidang Pertanian yang terdiri atas 4 program dan 14 kegiatan (Tabel. 2.4)

Tabel 2.4
Program dan Kegiatan
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat			17.507.560.000
	1.1 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			9.797.969.000
		Persentase Peningkatan Volume Bahan Pangan Yang Didistribusikan Untuk Stabilisasi Harga	120%	3.907.969.000
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Distribusi Pangan Melalui Sistem Logistik Daerah	12 Dokumen	356.769.000
		Volume Bahan Pangan Yang Difasilitasi Pendistribusiannya Untuk Stabilisasi Pasokan	2450 Ton	3.551.200.000
		Prosentase Sasaran Stabilisasi Harga Sesuai Dengan Sop	100	5.890.000.000
		Jumlah Informasi Harga Pangan	12 Dokumen	140.000.000
		Jumlah Intervensi Harga Pangan	5 Paket	5.750.000.000
	1.2 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi			7.651.621.000
		Persentase Peningkatan Volume Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	20%	7.651.621.000
		Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Yang Dikelola	420 Ton	7.651.621.000

		Rata-rata ketercukupan pangan	1,25	57.970.000
	1.3 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			57.970.000
		Jumlah Dokumen Rekomendasi Ketersediaan Pangan Yang Diusulkan	1 Dokumen	57.970.000
		Jumlah Laporan Ketersediaan Pangan Yang Disusun	12 Dokumen	57.970.000
2	Program Penanganan Kerawanan Pangan			7.055.935.000
		Persentase penurunan daerah rawan pangan dan gizi	0,01%	7.055.935.000
	2.1 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi			7.055.935.000
		Persentase Penanganan Desa Rawan Pangan Dan Gizi	5,5%	7.055.935.000
3	Program Pengawasan Keamanan Pangan			778.865.000
		Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan	90%	778.865.000
	3.1 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota			

		Jumlah Dokumen Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Yang Disusun*	1 Dokumen	144.813.000
		Jumlah Masyarakat Yang Teredukasi Tentang Mutu Dan Keamanan Pangan	250 Orang	144.813.000
		Jumlah Dokumen Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Yang Disusun**	1 Dokumen	444.859.000
		Jumlah Sampel Pangan Segar Yang Diawasi	500 Sampel	444.859.000
		Persentase produk pangan segar teregistrasi yang diawasi di peredaran	67%	14.877.000
		Jumlah Lokasi Pengawasan Ijin Edar	20 Lokasi	14.877.000
		Prosentase Kelompok / Pelaku Usaha Yang Penerapan Higiene Sanitasinya Meningkatkan Levelnya	20%	174.316.000
		Jumlah kelompok yang didampingi dalam penyusunan doksistu	3 Kelompok	71.085.000

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
		Jumlah Pelaku Usaha Yang Dibina Dalam Penerapan Higiene Sanitasi	20 Kelompok	103.231.000
4.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat			74.399.000
	4.1 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	Pph Kab/Kota > 87 (Drp)	34	74.399.00
		Jumlah Desa B2sa Di Daerah Rawan Pangan Yang Difasilitasi	5	74.399.000
		Skor PPH provinsi	94,2	1.321.566.000
	4.2 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			894.057.00
		Rekomendasi Ketersediaan Sumberdaya Pangan Lokal Yang Disusun	1 Dokumen	894.057.000
		Jumlah Kelompok / Pelaku Usaha Pengembangan Pangan Olahan Lokal Dan Pangan Pokok Lokal Yang Difasilitasi	12 Kelompok	894.057.000
	4.3 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi			427.509.000
		PPH Kab / Kota > 87	34	427.509.000
		Jumlah lokasi yang diberikan promosi/edukasi B2SA dan pangan loka	4 Lokasi	192.385.000
		Jumlah Paket Bahan Pangan Lokal Yang Dibagikan / Dibantukan	500 Paket	70.000.000

		Jumlah Desa B2sa Yang Difasilitasi	5 Desa	95.500.000
		Jumlah Dokumen Analisis Pph	1 Dokumen	69.624.000
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			18.671.487.000
		Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100%	320.901.000
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100%	18.350.586.000
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di BPMKP	100%	644.796.000
	5.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	100%	320.901.000
	5.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	3 Dokumen	14.899.929.000
	5.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			148.940.000
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	2 Dokumen	108.940.000
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada BPMKP	1 Dokumen	40.000.000
	5.4 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	1 Laporan	2.803.000

	5.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	100%	98.129.000
	5.6 Administrasi Umum Perangkat Daerah			634.590.000
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100%	594.504.000
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada BPMKP	100%	40.086.000
	5.7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			741.100.000
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	7 Unit	704.600.000
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada BPMKP	4 Unit	36.500.000
	5.8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.742.375.000
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	24 Laporan	1.393.875.000
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada BPMKP	24 Laporan	348.500.000
	5.9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			727.516.000
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	84 Unit	547.806.000
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada BPMKP	13 Unit	179.710.00

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja kegiatan tahunan, sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan. Di dalamnya ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Penyusunan ini seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan guna mendorong tercapainya sasaran-sasaran yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2025. Dengan tercapainya sasaran yang ditargetkan akan mempercepat terwujudnya Tujuan Strategis Dinas Ketahanan Pangan yang akan berkontribusi pada pencapaian Visi dan Misi Provinsi Jawa Tengah.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Pj. Gubernur Jawa Tengah untuk mewujudkan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Sasaran, Indikator, Target Kinerja dan Anggaran yang telah disepakati antara kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dengan Gubernur Tahun 2025, secara lengkap tercantum pada Tabel Tabel 2.5

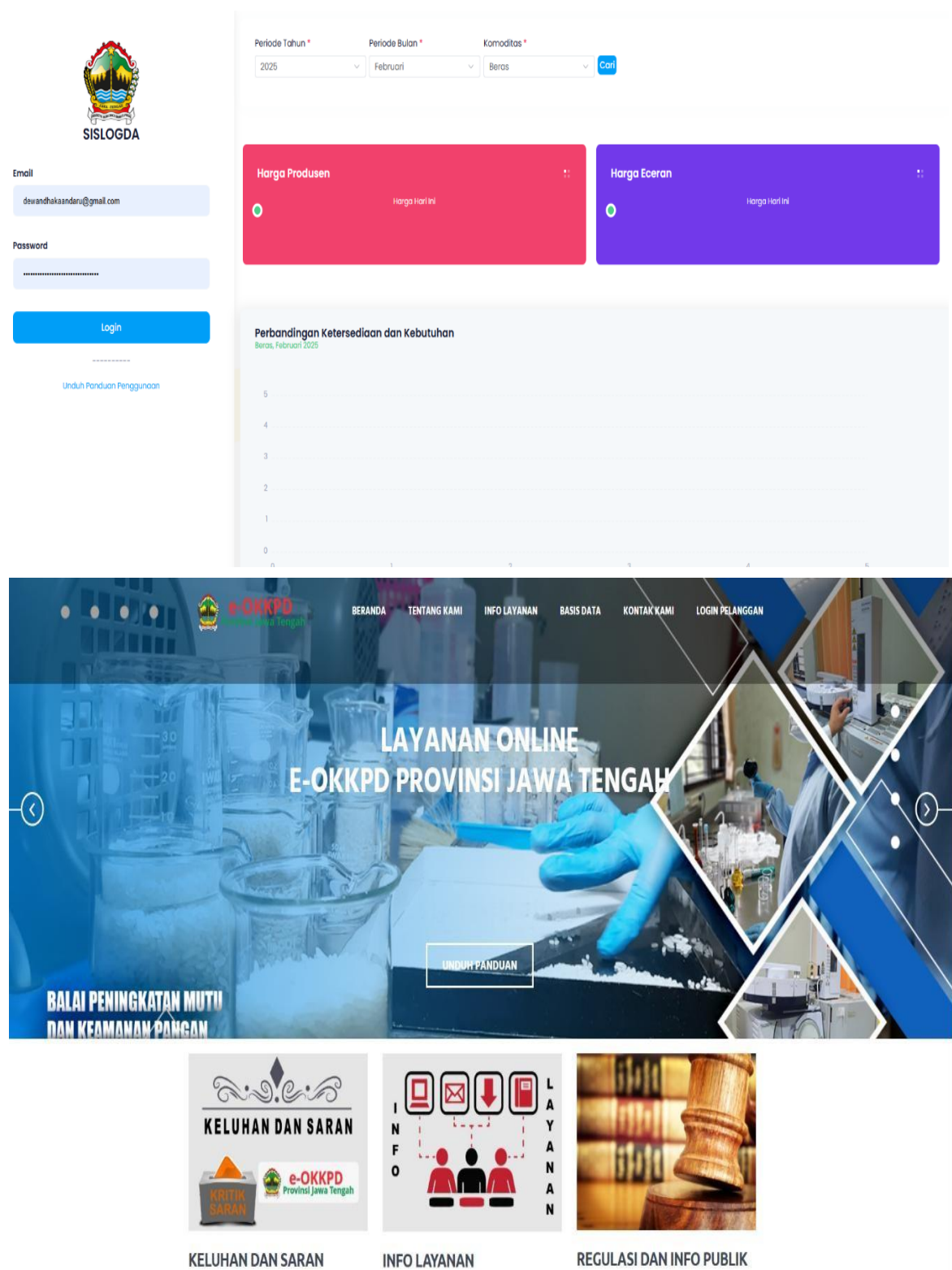
Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Mewujudkan ketahanan pangan Jawa Tengah	Indeks Ketahanan Pangan	Skor	85,47
	1.1 Meningkatnya ketersediaan pangan	Angka Kecukupan Energi	kkal/kapita/hari	3.600
	1.2 Meningkatnya Keterjangkauan / Akses Pangan	Rata-rata deviasi harga pangan strategis (beras)	%	8
		Persentase penanganan kecamatan rawan pangan	%	12
	1.3 Meningkatnya Pemanfaatan Pangan	Skor PPH Provinsi	Skor	94,2
2	Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	75,50
	2.1 Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	85
	2.2 Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	Angka	2,91

2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Dalam mendukung tercapainya Kinerja yang optimal dan penerapan SAKIP yang baik sebagai perwujudan *good governance*, maka Dinas Ketahanan Pangan menggunakan instrumen pendukung dari Sistem GRMS/SSO seperti e-planning, e-budgeting, e-RKO, e-penatausahaan, e-controlling, dan e-SHB yang wajib digunakan untuk membantu pekerjaan mulai dari perencanaan hingga evaluasi kinerja SKPD dan aplikasi SISLOGDA (Sistem Logistik Daerah) dan e-OKKPD (Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah).

Gambar 2.1
Instrumen Pendukung Capaian Kinerja
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025




E-Penatausahaan 2025

Home - Dinas Kelautan Pangan

Welcome


Home

KELOLA DATA


BELANJA


Cetak Belanja


Rincian-Belanja


Buku Rincian Objek


TTE

Dr. SLAMET EKO PRIASTIYO, SP M Si

gptt14pr2025 - 8880982309504003



Selamat datang di Aplikasi E-Penatausahaan 2025. Untuk mengakses panduan penggunaan aplikasi silahkan klik menu [Petunjuk Penggunaan](#)



E-Gov

Dr. SUKNO DUNO PRASITJO, SP.M Si
 caripengadit@idn - 081832030000103

Monitoring Input Indikator Target dan Realisasi

OPD
 Dinas Kabupaten Pangeran

Bidang
 Sensus Statistik

Triwulan
 Triwulan I

Level
 Tujuan OPD

Tahap
 Tahap 12 - Tahap 12 - Pengukuran Realisasi 2

Status Input
 Sensus Statistik

Aksi

Monitoring Input Indikator Target dan Realisasi - Tujuan OPD

Sensus Statistik

MONITORING INPUT INDIKATOR TUJUAN OPD

TRIWULAN 1

KODE (SIS)	INDIKATOR	UPLAH	AKHIR BELAKANG	TRIMESTER BERS	TRIMESTER SEMPIT	REALISASI
2018-001-0001	Dinas Kabupaten Pangeran					
2018-001-0001	Bidang Kabupaten Pangeran (Sensus Statistik)					
2018-001-0001	Indeks Indikator Pangeran	Sar	Pengeran aktif	85,17	85,34	85,19
2018-001-0001	Bidang Kabupaten Pangeran (Sensus Statistik)					
2018-001-0001	Indeks Indikator Pangeran	Sar	Pengeran aktif	85,17	85,34	85,19
2018-001-0001	Bidang Kabupaten Pangeran (Sensus Statistik)					
2018-001-0001	Indeks Indikator Pangeran (Sensus Statistik)	Sar	Pengeran aktif	85,17	85,34	85,19

2018 © E-Government, Kabupaten Pangeran Jawa Tengah

Made with E-Government

The screenshot displays the E-RKO 2025 dashboard interface. The top header shows the user 'Dr. SLAMET EKO PRASTIYO, SP.M Si' and the page title 'rpt_program_rih_2023 - Di SLAMET EKO PRASTIYO, SP.M Si'. The sidebar menu on the left includes 'Welcome', 'MENU', 'PENDAPATAN', 'BELANJA', 'PEMBIAYAAN', and 'Rekap Target Belanja'. The main content area features a filter section with 'OPD' set to 'Dinas Ketahanan Pangan' and 'Bidang' set to 'Semua Bidang'. Below this, the 'Progres Input Target Fisik dan Keuangan' section contains two large green circles, each representing 100% completion for '0 Belum Sesuai' and '100 Sesuai'.

[illegible]

E-PLANNING		Dr. Slamet EKO PRASTYO, SP M Si OPD Program EPL - 198105252006041003			
Draf RAB		7.853.000			
Dashboard		5.121.131.0001	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ***		
Menenktur Rerjra					
Menenktur Rerjra Perubahan		5.121.131.0001.0001	Lampu Led 10 Watt	12 Buah	100.000 1.200.000
Pendapatan		5.121.131.0001.0002	Kabel listrik	1 Gulung	500.000 500.000
Belanja		5.121.131.0001.0003	Stop Kontak	5 Set	100.000 500.000
Manajemen Risiko		5.121.131.0001.0004	Isolasi	6 Roll	30.000 180.000
Upload Dokumen		5.121.131.0001.0005	Test Pen	2 Buah	50.000 100.000
Upload Dokumen Perubahan		5.121.131.0001.0006	MCB 16 A	6 Buah	100.000 600.000
Cetak		5.121.131.0001.0007	Rol Kabel	4 Buah	150.000 600.000
Cetak Perubahan		5.121.131.0001.0008	Terminal kuningan	8 Buah	20.000 180.000
Cascade		5.121.131.0001.0009	Obeng	1 Set	250.000 250.000
SPD-RI		5.121.131.0001.0010	lampu downlight	5 Set	250.000 1.250.000
		5.121.131.0001.0011	Saklar lampu	4 Buah	30.000 120.000
		5.121.131.0001.0012	Lampu Led 18 Watt	5 Buah	150.000 750.000

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Menindaklanjuti pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakan Instansi Pemerintah.

Untuk mengukur serta menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dalam mengemban visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025. LKjIP disusun dengan memperhatikan capaian kinerja setiap sasaran yang ditetapkan. Sedangkan untuk pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

Selain pencapaian setiap sasaran, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga menyajikan capaian kinerja kegiatan tahun 2025. Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja setiap kegiatan meliputi Indikator Masukan (*input*), Keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*). Akan tetapi untuk sementara ini, dari lima indikator hanya digunakan tiga indikator yakni sampai dengan indikator hasil (*outcome*) dengan argumen kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah untuk indikator manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*) belum dapat dilakukan mengingat pengukuran yang relatif.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran pada Tabel 3.1 sebagai berikut.

Tabel 3. 1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No.	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Predikat Kinerja Organisasi
1	$X > 100 \%$	Istimewa
2	$80 \% < X \leq 100 \%$	Baik

3	60 % < X ≤ 80 %	Butuh Perbaikan
4	20 % X ≤ 60 %	Kurang
5	0 % ≤ X ≤ 20 %	Sangat Kurang

Pada tahun 2025, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029, terdapat 2 (dua) tujuan dan 5 (lima) sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun 2025, antara lain :

Tujuan : 1. Mewujudkan Ketahanan Pangan Jawa Tengah 2. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah
Sasaran Strategis : 1. Meningkatkan Ketersediaan Pangan 2. Meningkatkan Keterjangkauan / Akses Pangan 3. Meningkatkan Pemanfaatan Pangan 4. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah 5. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, telah ditetapkan indikator tujuan dan sasaran strategis pada Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3. 2
Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2025
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	Persentase	
1	Mewujudkan Ketahanan Pangan Jawa Tengah	Indeks Ketahanan Pangan	Skor	85,47	73,73	86,26	86,57
	1. Meningkatkan Ketersediaan Pangan	Angka Kecukupan Energi	kkal / kapita / hari	3.600	3.803	105,64	3.725
	2. Meningkatkan Keterjangkauan / Akses Pangan	Rata – Rata Deviasi Harga Pangan Strategis (Beras)	%	8	2,61	306,51	8

		Persentase Penanganan Kecamatan Rawan Pangan	%	12	12,5	104,16	6,75
	3. Meningkatkan Pemanfaatan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Provinsi	Skor	94,2	96,9	102,86	94,63
2	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	75,5	77,33	102,43	76
	1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko	Angka	2,91	3,05	104,81	2,96
	2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	85	91,5	107,65	87,5

Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah juga dinilai dari sasaran yang akan dicapai pada tahun 2025. Untuk mengukur capaian kinerja pada kelima Sasaran Strategis dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 3. 3
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Mewujudkan Ketahanan Pangan Jawa Tengah	Indeks Ketahanan Pangan	85,47	73,73	86,26	Baik	Badan Pangan Nasional
	Meningkatkan Ketersediaan Pangan	Angka Kecukupan Energi	3.600	3.803	105,64	Istimewa	<i>e-controlling</i>
	Meningkatkan Keterjangkauan / Akses Pangan	Rata – Rata Deviasi Harga Pangan Strategis (Beras)	8	2,61	306,51	Istimewa	<i>e-controlling</i>
		Persentase Penanganan Kecamatan Rawan Pangan	12	12,5	104,16	Istimewa	<i>e-controlling</i>
	Meningkatkan Pemanfaatan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Provinsi	94,2	96,9	102,86	Istimewa	Badan Pangan Nasional
2	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	75,5	77,33	102,43	Istimewa	<i>e-controlling</i>
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko	2,91	3,05	104,81	Istimewa	<i>e-controlling</i>
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	91,5	107,65	Istimewa	<i>e-controlling</i>

Dari Tabel 3.3 di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis pada Tahun 2025 untuk tujuan 1 (pertama) yaitu Mewujudkan Ketahanan Pangan Jawa Tengah dengan Indikator Kinerja Indeks Ketahanan Pangan terealisasi sebesar 73,73 dari target 85,47 dengan capaian sebesar 86,26% dan termasuk kategori **Baik**. Capaian tersebut dikarenakan adanya perbedaan penghitungan yang semula menggunakan 9 indikator menjadi 12 indikator baru, berdasarkan hasil penghitungan Indeks Ketahanan Pangan yang di *backcasting* pada tahun 2024, Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dengan capaian 73,73 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024 dengan capaian sebesar 70,78. Selain itu tingginya capaian tersebut juga dikarenakan adanya program – program yang mendukung baik pada sisi ketersediaan pangan di Jawa Tengah berupa Stabilisasi Pasokan Pangan, Akses Pangan yang Baik, Penjaminan Keamanan Pangan di Jawa Tengah dan Promosi Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) serta adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman.

Sasaran Pertama yang ingin dicapai pada tujuan pertama ini adalah Meningkatkan Ketersediaan Pangan dengan indikator kinerja Angka Kecukupan Energi dengan target sebesar 3.600 kkal/kapita/hari telah tercapai. Sasaran ini mendapatkan capaian 105,64% yang termasuk pada kategori **Istimewa**. Sasaran Kedua yang ingin dicapai pada tujuan pertama adalah Meningkatkan Keterjangkauan / Akses Pangan dengan indikator kinerja Rata – Rata Deviasi Harga Pangan Strategis (Beras) dengan target sebesar 8 % telah tercapai. Sasaran ini mendapatkan capaian 306,51 % yang termasuk pada kategori **Istimewa** dan indikator kinerja Persentase Penanganan Kecamatan Rawan Pangan dengan target sebesar 12 % telah tercapai. Sasaran ini mendapatkan capaian 104,16 % yang termasuk pada kategori **Istimewa**. Sasaran ketiga yang ingin dicapai pada tujuan pertama ini adalah Meningkatkan Pemanfaatan Pangan dengan indikator kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Provinsi dengan target sebesar 94,2 telah tercapai. Sasaran ini mendapatkan capaian 102,86 % yang termasuk pada kategori **Istimewa**.

Pada tujuan kedua yaitu Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah terealisasi sebesar 77,33 dari target 75,5 dengan capaian sebesar 102,43 dan termasuk kategori **Istimewa**.

Sasaran yang ingin dicapai pada tujuan kedua ini antara lain Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Indeks Manajemen Risiko dengan target 2,91 dan telah terealisasi sebesar 3,05 dengan capaian sebesar 104,81 % dengan kategori **Istimewa**. Tingginya capaian ini dikarenakan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah memahami, mengelola dan mengurangi risiko yang terjadi. Selain itu pada tujuan kedua ini juga memiliki sasaran yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target 85 dan telah terealisasi sebesar 91,5 dengan capaian sebesar 107,65 % dengan kategori **Istimewa**. Tingginya capaian ini dikarenakan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah memiliki kualitas tata kelola pemerintahan yang baik melalui aspek

akuntabilitas, layanan publik dan pengukuran kinerja berorientasi pada hasil.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan 2023 dan 2024

Tabel 3. 4
Perbandingan Capaian Kinerja
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 – 2025

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Mewujudkan Ketahanan Pangan Jawa Tengah	Indeks Ketahanan Pangan	-	-	-	83	85,34	102,81	85,47	73,73	86,26
	Meningkatkan Ketersediaan Pangan	Angka Kecukupan Energi	4.020	4.021	100,02	3.797	3.805	100,21	3.600	3.803	105,64
	Meningkatkan Keterjangkauan / Akses Pangan	Rata – Rata Deviasi Harga Pangan Strategis (Beras)	2	0,58	344,83	9,4	6,86	137,02	8	2,61	306,51
		Persentase Penanganan Kecamatan Rawan Pangan	1	52,56	5256	5	10,81	216,2	12	12,5	104,16
	Meningkatkan Pemanfaatan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Provinsi	88,80	94,2	106,08	94,2	93,6	99,04	94,2	96,9	102,86
2	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	-	-	-	82	80,85	98,59	75,5	77,33	102,43
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko	-	-	-	2,95	3,09	104,74	2,91	3,05	104,81
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	78	89,5	114,74	82	91	110,97	85	91,5	107,65

Tabel 3.4 menunjukkan bahwa realisasi indikator kinerja tujuan 1 terealisasi pada tahun 2025

dengan kategori **Baik**. Indikator kinerja Indeks Ketahanan Pangan merupakan indikator baru pada level tujuan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah sehingga tidak ada perbandingan dengan tahun sebelumnya.

Merujuk pada Tabel 3.4 diatas dapat dilihat bahwa realisasi pada tujuan 2 tercapai 120,43 dengan kategori **Istimewa**. Hal ini dikarenakan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah telah melakukan monitoring dan evaluasi secara formal dan terstruktur.

Realisasi sasaran strategis pertama pada tujuan pertama dari tahun 2023 hingga 2025 mengalami peningkatan terus menerus. Pada sasaran strategis kedua dari tahun 2024 mengalami penurunan dibanding tahun 2023, akan tetapi pada tahun 2025 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024. Pada sasaran strategis ketiga dari tahun 2023 hingga 2025 mengalami penurunan terus menerus. Pada sasaran strategis keempat dari tahun 2024 mengalami penurunan dibanding tahun 2023, akan tetapi pada tahun 2025 mengalami kenaikan dibanding tahun 2024.

Realisasi sasaran strategis pertama pada tujuan kedua mengalami peningkatan, akan tetapi pada tahun 2023 telah terdapat nilai untuk indikator Indeks Manajemen Risiko sebesar 2,944 sehingga pada tahun 2024 terdapat target sebesar 2,95 yang telah tercapai dengan realisasi sebesar 3,09 dengan capaian sebesar 104,74%. Sedangkan pada sasaran strategis kedua pada tujuan kedua dari tahun 2023 hingga 2025 mengalami penurunan secara terus menerus.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029

Tabel 3. 5
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025
dengan Target Akhir Renstra 2029

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir 2029	Tingkat Kemajuan
1	Mewujudkan Ketahanan Pangan Jawa Tengah	Indeks Ketahanan Pangan	73,73	86,57	85,17
	Meningkatkan Ketersediaan Pangan	Angka Kecukupan Energi	3.803	3.725	102,09
	Meningkatkan Keterjangkauan / Akses Pangan	Rata – Rata Deviasi Harga Pangan Strategis (Beras)	2,61	8	306,51
		Persentase Penanganan Kecamatan Rawan Pangan	12,5	6,75	185,18
	Meningkatkan Pemanfaatan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Provinsi	96,9	94,63	102,39
2	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	77,33	76	101,75
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko	3,05	2,96	103,04
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	91,5	87,5	104,57

Dari Tabel 3.5 diatas dapat dilihat bahwa tingkat capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah terdapat beberapa indikator kinerja yang melebihi target akhir Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029.

Indikator tujuan pertama mendapatkan hasil capaian yang kurang dari target akhir Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dengan hasil 73,73 pada Indeks Ketahanan Pangan, sedangkan sasaran strategis pertama, sasaran strategis kedua, dan sasaran strategis ketiga mendapatkan hasil capaian yang melebihi dari target akhir Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dengan hasil 3.803 pada indikator kinerja Angka Kecukupan Energi, 2,61 pada indikator kinerja Rata – Rata Deviasi Harga Pangan Strategis (Beras), dan 12,5 pada indikator kinerja Persentase Penanganan Kecamatan Rawan Pangan, serta 96,9 pada indikator kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Provinsi.

Indikator tujuan kedua dan sasaran strategis pertama dan sasaran strategis kedua mendapatkan hasil capaian yang melebihi dari target akhir Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dengan hasil 77,33 pada indikator kinerja tujuan Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah), 3,05 pada indikator kinerja sasaran Indeks Manajemen Risiko, dan 91,5 pada indikator kinerja sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Tabel 3. 6
Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan
atau Peningkatan / Penurunan Kinerja

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
1	Mewujudkan Ketahanan Pangan Jawa Tengah	Indeks Ketahanan Pangan	85,47	73,73	86,26	Penghitungan Indeks Ketahanan Pangan oleh Badan Pangan Nasional menggunakan metode penghitungan baru yang semula hanya menggunakan 9 indikator menjadi 12 indikator baru. Berdasarkan hasil penghitungan IKP yang di <i>backcasting</i> pada tahun 2024, Indeks Ketahanan Pangan Jawa Tengah Tahun 2025 (dengan capaian 73,73) mengalami peningkatan	Koordinasi bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Bappeda) terkait formulasi penghitungan dan target kinerja pada indikator tujuan Dinas Ketahanan Pangan

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
						dibandingkan dengan tahun 2024 (capaian 70,78). Capaian Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 menggunakan 9 indikator adalah sebesar 85,34.	Provinsi Jawa Tengah hingga akhir RPJMD.
	Meningkatkan Ketersediaan Pangan	Angka Kecukupan Energi	3.600	3.803	105,64	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang optimal memberikan dampak signifikan terhadap keberhasilan sasaran ketersediaan pangan.	-
	Meningkatkan Keterjangkauan / Akses Pangan	Rata – Rata Deviasi Harga Pangan Strategis (Beras)	8	2,61	306,51	Harga Beras di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) dikarenakan terdapat penetapan HET baru pada Beras Medium di bulan Agustus 2025 melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 299 Tahun 2025 (HET Beras menjadi naik dari semula Rp 12.500 menjadi Rp 13.500) di waktu yang bersamaan, Perum Bulog menyalurkan Beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) di tingkat pengecer dengan harga Rp 12.500 sehingga harga Beras secara rerata berada di bawah HET.	-
		Persentase Penanganan Kecamatan Rawan Pangan	12	12,5	104,16	Penanganan Daerah Rawan Pangan melalui pola Subsidi Pangan di Daerah Rawan Pangan memberikan dampak signifikan terhadap penurunan level kecamatan rawan pangan.	-

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
	Meningkatkan Pemanfaatan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Provinsi	94,2	96,9	102,86	Pola Konsumsi pada skor Pola Pangan Harapan Provinsi menunjukkan adanya <i>awareness</i> masyarakat terhadap pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA)	-
2	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	75,5	77,33	102,43	Telah optimalnya monitoring dan evaluasi pada setiap aktivitas program dan kegiatan yang ada	-
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko	2,91	3,05	104,81	Terdapat peningkatan capaian kinerja organisasi yang cukup signifikan	-
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	91,5	107,65	Terdapat peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat	-

Dari Tabel 3.6 diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah berada pada kategori **Baik**. Tujuan Pertama yaitu Mewujudkan Ketahanan Pangan Jawa Tengah dengan indikator kinerja Indeks Ketahanan Pangan terealisasi 73,73 dengan capaian sebesar 86,26%. Hal tersebut dikarenakan program – program yang mendukung baik ketersediaan pangan di Jawa Tengah, stabilisasi pasokan pangan, akses pangan yang baik, penjaminan mutu dan keamanan pangan di Jawa Tengah serta promosi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) serta adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman. Selain itu pada sasaran strategis pertama yaitu Meningkatkan Ketersediaan Pangan dengan indikator kinerja Angka Kecukupan Energi terealisasi sebesar 3.803 dengan capaian sebesar 105,64%. Tercapainya sasaran strategis pertama dikarenakan Kegiatan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi mengalami peningkatan yang signifikan sehingga pengelolaan CPP Provinsi dapat berjalan optimal. Sasaran strategis kedua yaitu Meningkatkan Keterjangkauan / Akses Pangan dengan indikator kinerja Rata – Rata Deviasi Harga Pangan Strategis (Beras) terealisasi sebesar 2,61 dengan capaian sebesar 306,51% dikarenakan adanya perubahan Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras Medium dan juga adanya penyaluran dari Perum Bulog pada Beras SPHP yang menyebabkan deviasi harga beras di masyarakat dapat turun. Indikator kinerja selanjutnya pada sasaran strategis kedua yaitu Persentase

Penanganan Kecamatan Rawan Pangan terealisasi sebesar 12,5 dengan capaian sebesar 104,16% dikarenakan penanganan daerah rawan pangan dapat dioptimalkan melalui pemberian subsidi pangan pada daerah rawan pangan dan gizi. Sasaran strategis ketiga yaitu Meningkatkan Pemanfaatan Pangan dengan indikator kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Provinsi terealisasi sebesar 96,9 dengan capaian sebesar 102,43% dikarenakan Pola Konsumsi pada skor Pola Pangan Harapan Provinsi menunjukkan adanya *awareness* masyarakat terhadap pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA).

Tujuan kedua yaitu Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) terealisasi 77,33 dengan capaian sebesar 102,43%. Hal tersebut dikarenakan telah optimalnya monitoring dan evaluasi pada setiap aktivitas program dan kegiatan yang ada. Pada sasaran strategis pertama pada tujuan kedua yaitu Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Indeks Manajemen Risiko tercapai sebesar 3,05 dengan capaian sebesar 104,81% dikarenakan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah memahami, mengelola dan mengurangi adanya risiko yang terjadi. Sasaran strategis kedua pada tujuan kedua yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terealisasi sebesar 91,5 dengan capaian sebesar 107,65 dikarenakan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah memiliki kualitas tata kelola pemerintahan yang baik melalui aspek akuntabilitas, layanan publik dan pengukuran kinerja berorientasi hasil.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3. 7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pencapaian Tujuan dan Sasaran
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

No.	Tujuan / Sasaran	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	Mewujudkan Ketahanan Pangan Jawa Tengah	85,47	73,73	86,26	27.788.583.000			
	Meningkatkan Ketersediaan Pangan	3.600	3.803	105,64	7.709.591.000			
	Meningkatkan Keterjangkauan / Akses Pangan	8	2,61	306,51	9.797.969.000			
		12	12,5	104,16	7.130.334.000			
	Meningkatkan Pemanfaatan Pangan	94,2	96,9	102,86	3.150.689.000			

No.	Tujuan / Sasaran	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
2	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah	75,5	77,33	102,43	19.316.283.000	18.251.737.083	94,49	
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	2,91	3,05	104,81	320.901.000	307.226.054	95,74	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	85	91,5	107,65	18.995.382.000			

3.2.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tabel 3.8
 Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
1	Mewujudkan Ketahanan Pangan Jawa Tengah	Indeks Ketahanan Pangan	86,26				Menunjang
	Meningkatkan Ketersediaan Pangan	Angka Kecukupan Energi	105,64				Menunjang
				Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rata-rata ketercukupan pangan	160	Menunjang
					Rasio penyediaan cadangan pangan pemerintah provins	215,55	Menunjang
					Rasio cadangan pangan masyarakat	100	Menunjang

				Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	JUMLAH DOKUMEN REKOMENDASI KETERSEDIAAN PANGAN YANG DIUSULKAN	100	Menunjang
				Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	PERSENTASE PENINGKATAN VOLUME CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PROVINSI	117,6	Menunjang
					PERSENTASE PENYALURAN CADANGAN PANGAN MASYARAKAT	100	Menunjang
	Meningkatan Keterjangkauan /Akses Pangan	Rata-rata deviasi harga pangan strategis (beras)	306,51	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase komoditas pangan strategis dengan harga efektif sesuai ketentuan yang berlaku	155,84	Menunjang
				Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan	PROSENTASE SASARAN STABILISASI	100	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
				Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	HARGA SESUAI DENGAN SOP		
					PERSENTASE PENINGKATAN VOLUME BAHAN PANGAN YANG DIDISTRIBUSIKAN UNTUK STABILISASI HARGA	128,77	Menunjang
					PERSENTASE PENINGKATAN KAPASITAS USAHA PADA LEMBAGA USAHA PANGAN MASYARAKAT	100	Menunjang
		Persentase Penanganan Kecamatan Rawan Pangan	104,16	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penurunan Daerah Rawan pangan dan gizi	1200	Menunjang
				Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Persentase Penanganan Desa Rawan Pangan dan Gizi	113,63	Menunjang
				Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rasio cadangan pangan masyarakat (DRP)	100	Menunjang
				Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	PERSENTASE PENYALURAN CADANGAN PANGAN MASYARAKAT (DMP)	100	Menunjang
				Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah (DRP)	108,37	Menunjang
				Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	PPH KAB/KOTA > 87 (DRP)	100	Menunjang
	Meningkatkan Pemanfaatan Pangan	Skor PPH Provinsi	102,86	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah	108,37	Menunjang
				Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan	PPH KAB/KOTA > 87	100	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
				Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi			
				Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	REKOMENDASI KETERSEDIAAN SUMBERDAYA PANGAN LOKAL YANG DISUSUN	100	Menunjang
				Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan	118,24	Menunjang
				Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	JUMLAH DOKUMEN REKOMENDASI KEAMANAN PANGAN SEGAR YANG DISUSUN*	100	Menunjang
					PROSENTASE KELOMPOK / PELAKU USAHA YANG PENERAPAN HIGIENE SANITASINYA MENINGKAT LEVELNYA	100	Menunjang
					JUMLAH DOKUMEN REKOMENDASI KEAMANAN PANGAN SEGAR YANG DISUSUN**	100	Menunjang
					Persentase produk pangan segar terregistrasi yang diawasi di peredaran	128,82	Menunjang
				Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase rekomendasi jaminan mutu dan keamanan pangan yang diterbitkan	122,41	Menunjang
				Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sertifikat jaminan mutu dan keamanan pangan pada balai	100,5	Menunjang
2	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	102,43	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100	Menunjang
				Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi	Persentase dokumen perencanaan, dan	100	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
				Kinerja Perangkat Daerah	evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan		
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	100	Menunjang
				Administrasi Barang Milik Daerah pada PD	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100	Menunjang
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD	Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	100	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian PD	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	100	Menunjang
				Administrasi Umum PD	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	100	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	100	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	100	Menunjang
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di BPMKP	100	Menunjang
				Administrasi Barang Milik	Jumlah jenis dokumen	100	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
				Daerah pada PD	administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada BPMKP		
				Administrasi Umum PD	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada BPMKP	100	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan pada BPMKP	100	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada BPMKP	100	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada BPMKP	100	Menunjang

a. Capaian Target Kinerja Program dalam Perjanjian Kinerja

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran serta kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah yang optimal, efektif, dan tepat sasaran, Dinas Ketahanan Pangan memiliki program dan kegiatan yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang Dinas Ketahanan Pangan antara lain Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Penanganan Kerawanan Pangan, Program Pengawasan Keamanan Pangan, dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Pada tabel 3.8 di atas disampaikan bahwa capaian pada 4 program dan 14 kegiatan yang ada di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah adalah capaian dibawah 100%, tercapai 100% dan yang melampaui 100%.

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat memiliki realisasi capaian di atas 100%. Program ini memiliki 7 indikator kinerja program dengan tingkat capaian sangat tinggi.

Indikator dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu Rata-rata kecukupan pangan dengan target 1,25 terealisasi 2, Rasio penyediaan cadangan pangan pemerintah provinsi dengan target 0,45 terealisasi sebesar 0,97, Persentase komoditas pangan strategis dengan harga efektif sesuai ketentuan yang berlaku dengan target 55% terealisasi sebesar 85,71%. Adapun indikator yang memiliki capaian 100% yaitu rasio cadangan pangan masyarakat dengan target 0 dan

teralisasi 0 , rasio cadangan pangan masyarakat (DRP) dengan target 0 teralisasi 0 , angka konsumsi beras Provinsi Jawa tengah dengan target 87,7 teralisasi 80,93, dan angka konsumsi beras Provinsi Jawa tengah (DRP) dengan target 87,7 teralisasi 80,93. Program ini tidak ditemukan permasalahan sehingga dapat dikatakan indikator kinerja tersebut menunjang program/kegiatan yang direncanakan dan telah dilaksanakan dengan optimal. Seluruh indikator kinerja Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat telah tercapai sesuai target akhir RPD yang telah ditetapkan.

Program Penanganan Kerawanan Pangan memiliki realisasi capaian di atas 100%. Program ini memiliki 1 indikator kinerja program dengan tingkat capaian sangat tinggi.

Indikator dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu Persentase penurunan daerah rawan pangan dan gizi dengan target 0,01% telah teralisasi sebesar 0,12%. Program ini tidak ditemukan permasalahan sehingga dapat dikatakan indikator kinerja tersebut menunjang program/kegiatan yang direncanakan dan telah dilaksanakan dengan optimal dan telah tercapai sesuai target akhir RPD yang telah ditetapkan. Manfaat program ini bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin di daerah yang rentan terhadap rawan pangan sehingga dapat mewujudkan ketahanan pangan masyarakat yang mandiri.

Program Pengawasan Keamanan Pangan memiliki realisasi capaian di atas 100%. Program ini memiliki 2 indikator kinerja program dengan tingkat capaian sangat tinggi.

Indikator dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu Persentase PSAT yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan dengan target 90% telah teralisasi sebesar 94,01% dan Persentase rekomendasi Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan dengan target 80% telah teralisasi sebesar 97,93%. Program ini tidak ditemukan permasalahan sehingga dapat dikatakan indikator kinerja tersebut menunjang program/kegiatan yang direncanakan dan telah dilaksanakan dengan optimal dan telah tercapai sesuai target akhir RPJMD yang telah ditetapkan. Manfaat program ini bertujuan agar produk pangan segar yang sudah bersertifikat mampu bersaing dengan produk impor dan mampu menembus pasar-pasar modern, sehingga ada perbaikan harga yang lebih baik dibandingkan pangan yang belum bersertifikat.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi memiliki realisasi capaian 100%. Program ini memiliki 3 indikator kinerja program dengan tingkat capaian sangat tinggi.

Indikator dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu Persentase tingkat ketercapaian kinerja Perangkat Daerah, Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah, dan Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di BPMKP. Pada tahun 2025

ketiga indikator tersebut dengan target sebesar 100% telah terealisasi. Program ini tidak ditemukan permasalahan sehingga dapat dikatakan indikator kinerja tersebut menunjang program/kegiatan yang direncanakan dan telah dilaksanakan dengan optimal dan telah tercapai sesuai target akhir RPJMD yang telah ditetapkan. Manfaat program ini bertujuan dalam rangka menunjang terlaksana dan tersedianya serta terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi keuangan dan penunjang pelaksanaan tugas Dinas Ketahanan Pangan.

b. Capaian Target Kinerja Output Kegiatan

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan didukung oleh 3 kegiatan yaitu Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi, dan Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi.

- 1) Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

Indikator kinerja dari kegiatan tersebut antara lain jumlah dokumen rekomendasi ketersediaan pangan yang diusulkan, prosentase sasaran stabilisasi harga sesuai dengan SOP, persentase peningkatan volume bahan pangan yang didistribusikan untuk stabilisasi harga, persentase peningkatan kapasitas usaha pada lembaga usaha pangan masyarakat, dan rekomendasi ketersediaan sumberdaya pangan lokal yang disusun.

Realisasi indikator kegiatan jumlah dokumen rekomendasi ketersediaan pangan yang diusulkan dari target 1 Dokumen tercapai dengan tingkat capaian 100%. Indikator kinerja ini didukung oleh sub kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan dengan target keluaran 12 Dokumen telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Laporan rekomendasi tersebut disusun berdasarkan hasil analisis ketersediaan pangan strategis selama 12 bulan dan analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) tahun 2025. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp. 57.970.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 57.669.500,- atau telah terserap 99,48 persen, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan.

Realisasi indikator kegiatan prosentase sasaran stabilisasi harga sesuai dengan SOP dari target 100% tercapai dengan tingkat capaian 100%. Indikator kinerja ini didukung oleh Sub Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi dengan indikator Jumlah Informasi Harga Pangan dengan target 12 Dokumen terealisasi 100% dan indikator

jumlah intervensi harga pangan dengan target 5 paket terealisasi 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 5.890.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 5.889.135.625,- atau terserap 99,99 persen, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan dan target yang ditetapkan.

Realisasi indikator kegiatan presentase peningkatan volume bahan pangan yang didistribusikan untuk stabilisasi harga dari target 120% tercapai dengan tingkat capaian 128,77%. Indikator kinerja ini didukung oleh Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya dengan indikator kinerja volume bahan pangan yang difasilitasi pendistribusiannya untuk stabilisasi pasokan dengan target 2.450 ton terealisasi 2.561,71 ton dan indikator kinerja jumlah dokumen pelaksanaan pendistribusian pangan melalui sistem logistik daerah dengan target 12 dokumen terealisasi 100%. Upaya yang dilakukan untuk mencapai target yaitu dengan melakukan pengembangan SISLOGDA, melalui kegiatan:

- 1) Pengembangan Sistem Informasi Pangan;
- 2) Penguatan sarana prasarana pendukung SISLOGDA; dan
- 3) Fasilitasi distribusi pangan; dan

Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran Rp. 3.907.969.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 3.906.639.500,- atau telah terserap 99,97%, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan dan target yang ditetapkan.

Realisasi indikator kegiatan rekomendasi ketersediaan sumberdaya pangan lokal yang disusun dari target 1 Dokumen tercapai dengan tingkat capaian 100%. Indikator kinerja ini didukung oleh sub kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dengan indikator kinerja jumlah kelompok / pelaku usaha pengembangan pangan olahan lokal dan pangan pokok lokal yang difasilitasi dengan target 12 kelompok terealisasi sebesar 100%. Kegiatan ini didukung dengan anggaran Rp. 894.057.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 857.293.147,- atau terserap 95,89 persen dengan demikian penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan.

- 2) Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi Indikator kinerja dari kegiatan tersebut adalah persentase peningkatan volume cadangan pangan pemerintah provinsi.

Realisasi indikator kegiatan persentase peningkatan volume cadangan pemerintah provinsi pangan dari target 20% tercapai dengan tingkat capaian 117,6%. Indikator kinerja ini didukung oleh sub kegiatan Pengelolaan cadangan pangan pemerintah provinsi dengan target keluaran 420 ton Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang disediakan terealisasi 724,15 ton (tingkat capaian 172,4167%), sebagaimana terinci dalam tabel 3.9.

Tabel 3.9
Rincian Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah

No.	Stock/Distribusi	Gabah (Kg)	Setara Beras (Kg)
1	Stock Per 31 Desember 2025	201.000	116.326,29
2	Pengadaan Tahun 2025	697.000	-
3	Jumlah CPP Dikelola Tahun 2025	771.500	-
4	Jumlah gabah digiling	770.850	-
5	Jumlah distribusi beras	-	446.655
6	Penyusutan	-	1.960
7	Stock Per 30 Desember 2025	201.000	118.286,29

Selain itu juga terdapat cadangan pangan berupa mie mocaf dengan jumlah stok hingga Desember 2025 sebanyak 65.816 bungkus dan cadangan pangan berupa beras analog dengan jumlah stok hingga Desember 2025 sebanyak 9.444 bungkus. Provinsi Jawa Tengah di bawah koordinasi Dinas Ketahanan Pangan mengelola cadangan pangan yang dimanfaatkan untuk intervensi penanganan masyarakat yang mengalami rawan pangan transien, baik karena terjadinya bencana, anomali iklim, gagal panen, gejolak harga atau kemiskinan. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 7.651.621.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 7.649.375.460,- atau terserap 99,97 persen dengan demikian penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan.

- 3) Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi

Indikator kinerja dari kegiatan tersebut antara PPH Kab/Kota > 87 dan PPH Kab/Kota > 87 (DRP)

Realisasi indikator kegiatan PPH Kab/Kota > 87 dari target 34 tercapai dengan tingkat capaian 100%. Indikator kinerja ini didukung oleh sub kegiatan Promosi Panganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dengan indikator kineja jumlah lokasi yang diberikan promosi/edukasi B2SA dan pangan lokal dengan target 4 lokasi terealisasi 675% dan indikator jumlah paket bahan pangan lokal yang dibagikan/dibantukan dengan target 500 paket terealisasi 500 paket sehingga tingkat capaian 100%;

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) dengan 3 target keluaran: (I) 5 desa B2SA yang difasilitasi telah tercapai dengan tingkat capaian 100%; (II) 1 dokumen analisa Pola Pangan Harapan (PPH) yang disusun telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Kegiatan ini didukung dengan dana sebesar Rp. 169.899.000,- dengan realisasi anggaran Rp.164.053.864,- atau terserap 96,55 persen, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan.

Realisasi indikator kegiatan PPH Kab/Kota > 87 (DRP) dari target 34 tercapai 34 dengan tingkat capaian 100%. Indikator kinerja ini didukung oleh sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) dengan target keluaran 5 Desa B2SA di daerah rawan pangan yang difasilitasi tercapai dengan tingkat capaian 100%. Kegiatan ini didukung dengan dana sebesar Rp. 74.399.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 72.969.000,- atau terserap 98,08 persen, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan.

Program Penanganan Kerawanan Pangan didukung oleh 1 kegiatan yaitu Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi. Indikator kinerja dari kegiatan tersebut adalah persentase penanganan daerah rawan pangan. Realisasi indikator kegiatan prosentase penanganan daerah rawan pangan dan gizi dari target 5,5% tercapai 6,25% dengan tingkat capaian 113,64%. Indikator kinerja ini didukung oleh sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi dengan target keluaran 12 dokumen peta kewaspadaan pangan dan gizi, 1 dokumen rekomendasi kebutuhan kerawanan pangan lintas sektor, 30 desa rawan pangan dan gizi yang difasilitasi, 40 desa stunting yang diintervensi, 1 laporan Peta Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan atau *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA) dan 1 dokumen manajemen food loss dan atau food waste telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 7.055.935.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.045.174.098,- atau terserap 99,85 persen, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan.

Program Pengawasan Keamanan Pangan didukung oleh 1 kegiatan yaitu Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota. Indikator kinerja dari kegiatan tersebut antara lain Jumlah dokumen rekomendasi keamanan pangan segar yang disusun*, Prosentase kelompok/pelaku usaha yang penerapan hygiene sanitasinya meningkat levelnya, jumlah dokumen rekomendasi keamanan pangan segar yang disusun**, persentase produk pangan segar teregistrasi yang diawasi di peredaran dan jumlah sertifikat jaminan mutu dan keamanan pangan pada balai.

Realisasi indikator kegiatan Jumlah dokumen rekomendasi keamanan pangan segar yang disusun* dari target 1 dokumen tercapai dengan tingkat capaian 100%. Indikator kinerja ini didukung oleh sub kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan dengan indikator jumlah masyarakat yang teredukasi tentang mutu dan keamanan pangan. Target 250 orang dan terealisasi sebanyak 297 orang sehingga tingkat capaian 118,8%. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 144.813.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 144.729.900,- atau terserap 99,94 persen, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan.

Realisasi indikator kegiatan Prosentase kelompok/pelaku usaha yang penerapan hygiene sanitasinya meningkat levelnya dari target 20% tercapai dengan tingkat capaian 100%. Indikator kinerja ini didukung oleh sub kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawasan Keamanan dan mutu Pangan Segar Asal tumbuhan dengan target keluaran 20 kelompok/pelaku usaha yang dibina dalam penerapan hygiene sanitasi telah tercapai dengan tingkat capaian 110% dan indikator kinerja jumlah kelompok yang didampingi dalam penyusunan doksistu dengan target 3

kelompok dengan tingkat capaian 100%. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 174.316.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 168.243.870,- atau terserap 97,65 persen, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan.

Realisasi indikator kegiatan jumlah dokumen rekomendasi keamanan pangan segar yang disusun** dari target 1 dokumen tercapai dengan tingkat capaian 100%. Indikator kinerja ini didukung oleh sub kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan sear asal tumbuhan dengan indikator jumlah sampel pangan segar yang diawasi target keluaran 500 sampel telah tercapai 880 sampel dengan tingkat capaian 176%. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 444.859.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 442.010.142,- atau terserap 99,36 persen, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan.

Realisasi indikator kegiatan persentase produk pangan segar teregistrasi yang diawasi di peredaran dari target 67% tercapai 86,31% dengan tingkat capaian 128,82%. Indikator kinerja ini didukung oleh sub kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan dengan hasil sampel pangan yang diuji 20 lokasi dari target 29 lokasi telah tercapai dengan tingkat capaian 145%. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 14.877.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 14.856.300,- atau terserap 99,82 persen, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan.

Realisasi indikator kegiatan jumlah sertifikat jaminan mutu dan keamanan pangan pada balai dari target 2 dokumen tercapai 2,01 dengan tingkat capaian 100,5%. Indikator kinerja ini didukung oleh sub kegiatan Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan dengan target keluaran 50 sertifikat dengan tingkat capaian 189 sertifikat (378%). Sub kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan dengan indikator kinerja jumlah sampel pangan yang diuji target 90 sampel telah terealisasi 318 sampel dengan tingkat capaian 353,33%. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 1.050.258.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 1.047.046.363,- atau terserap 99,69 persen, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi didukung oleh 9 kegiatan yaitu Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kinerja dari kegiatan tersebut adalah Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan. Realisasi indikator kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun dari target 100 persen tercapai dengan tingkat capaian 100%. Indikator kinerja ini didukung oleh sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan target dokumen telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 225.637.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 212.642.054,- atau terserap 94,24, dengan tercapainya target penyusunan dokumen perencanaan yang terdiri atas dokumen Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025, dokumen Rencana Kerja Anggaran Tahun 2026 dan dokumen perencanaan lainnya.

Selain itu, indikator kinerja kegiatan ini juga didukung oleh sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan target 18 dokumen telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 95.264.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 94.584.000,- atau terserap 99,29%, dengan tercapainya target penyusunan dokumen evaluasi yang terdiri atas dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan dan Laporan Tahunan Program Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan. Selain itu Dinas Ketahanan Pangan juga berkontribusi dalam penyediaan data dalam penyusunan draf laporan evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024 dan dokumen evaluasi lainnya.

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator kinerja dari kegiatan tersebut adalah Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun. Realisasi indikator kegiatan Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun dari target 3 dokumen tercapai dengan tingkat capaian 100%. Indikator kinerja ini didukung oleh sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan target 93 orang telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 14.254.439.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 13.505.934.020,- atau terserap 94,75%, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut terlaksana dengan baik. Selanjutnya juga didukung oleh sub kegiatan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN dengan target 12 dokumen telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp

376.274.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 365.330.000,- atau terserap 97,09%, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut terlaksana dengan baik. Dan serta didukung oleh sub kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD dengan target 12 laporan telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp 269.216.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 255.498.535,- atau terserap 94,90%, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut terlaksana dengan baik.

3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Indikator kinerja dari kegiatan tersebut antara lain Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah dan Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada BPMKP.

Realisasi indikator kegiatan Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah dari target 2 dokumen tercapai dengan tingkat capaian 100%. Indikator kinerja ini didukung oleh sub kegiatan pengamanan barang milik daerah SKPD dengan target 2 dokumen telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 100.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 98.937.431,- atau terserap sebesar 98,94%, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut terlaksana dengan baik. Kegiatan tersebut juga didukung oleh Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan target 4 laporan dan terealisasi 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 8.940.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 8.646.000,- atau terserap sebesar 96,71%, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut terlaksana dengan baik.

4) Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Indikator kinerja dari kegiatan tersebut adalah Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah. Realisasi indikator kegiatan Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah dari target 1 laporan tercapai dengan tingkat capaian 100%. Indikator kinerja ini didukung oleh sub kegiatan Pengolahan Data Retribusi Daerah dengan target 4 laporan telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 2.803.000,- dengan realisasi anggaran sebesar

Rp 1.796.000,- atau terserap 64,07%, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut terlaksana dengan baik

5) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator kinerja dari kegiatan tersebut adalah Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan. Realisasi indikator kegiatan Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan dari target 100% tercapai dengan tingkat capaian 100%. Indikator kinerja ini didukung oleh sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan target 1 paket telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 98.129.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 96.086.560,- atau terserap 97,92%, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut terlaksana dengan baik.

6) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator kinerja dari kegiatan tersebut antara lain Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan.

Realisasi indikator kegiatan Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan dari target 100% tercapai dengan tingkat capaian 100%. Indikator kinerja ini didukung oleh sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan target 12 paket telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 45.593.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 45.300.228,- atau terserap 99,36%. Sub kegiatan yang menunjang indikator kinerja ini selanjutnya yaitu Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan target 12 paket telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 47.567.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 43.011.000,- atau terserap 90,42%. Selanjutnya didukung oleh sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan target 12 paket telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 24.052.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 24.030.500,- atau terserap 99,91%. Sub kegiatan selanjutnya yaitu Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan target 12 laporan telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar

Rp 49.370.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 49.300.000,- atau terserap 99,86%. Sub kegiatan selanjutnya yaitu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target 12 laporan telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 325.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 324.710.272,- atau terserap 99,91%. Selanjutnya sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan target 1 laporan telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 8.816.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 5.663.000,- atau terserap 64,24%. Sub kegiatan selanjutnya yaitu Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dengan target 12 dokumen telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp 94.106.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 92.737.270,- atau terserap 98,55% dengan demikian penggunaan anggaran tersebut terlaksana dengan baik.

7) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator kinerja dari kegiatan tersebut antara lain Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan dan Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.

Realisasi indikator kegiatan Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan dari target 7 unit tercapai dengan tingkat capaian 100%. Indikator kinerja ini didukung oleh sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan target 7 unit telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 704.600.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 693.600.000,- atau terserap sebesar 98,44%, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut terlaksana dengan baik.

8) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja dari kegiatan tersebut antara lain Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun.

Realisasi indikator kegiatan Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun dari target 36 laporan tercapai dengan tingkat capaian 100%. Indikator kinerja ini didukung oleh sub kegiatan yang menunjang indikator kinerja ini selanjutnya yaitu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan target 12 laporan telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 414.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 203.621.841,- atau terserap 49,18%. Dan terakhir, indikator kinerja kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan target 12 laporan telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp 979.875.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 974.099.008,- atau terserap 99,41%, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut terlaksana dengan baik.

9) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja dari kegiatan tersebut antara lain Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan.

Realisasi indikator kegiatan Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan dari target 66 unit tercapai dengan tingkat capaian 100%. Indikator kinerja ini didukung oleh sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan target 24 unit telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 213.781.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 206.535.432,- atau terserap 96,41%. Sub kegiatan yang menunjang indikator kinerja ini selanjutnya yaitu pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dengan target 2 unit telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 295.165.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 288.362.000,- atau terserap 97,70%. Dan terakhir, indikator kinerja kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dengan target 60 unit telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp 38.860.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 38.860.000,- atau terserap 100%, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut terlaksana dengan baik.

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pada tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah didukung dengan APBD sebesar Rp 39.805.906.000,-, namun setelah dilakukan perubahan anggaran, maka terjadi perubahan anggaran menjadi Rp 40.421.263.000,- (empat puluh milyar empat ratus dua puluh satu juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) terserap sebesar Rp. 38.747.206.024,- (97,34%) secara ringkas komposisi penggunaan anggaran sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi sebesar Rp. 36.060.597.524,-
- b. Belanja Modal sebesar Rp. 2.686.608.500,-

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran sebagaimana tersaji pada tabel 3.10 sebagai berikut:

Tabel 3.10
Ringkasan Penggunaan Anggaran Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	17.507.560.000	17.502.820.085	99,97
	1.1 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	9.855.939.000	9.853.444.625	99,97
	1.2 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	7.651.621.000	7.649.375.460	99,97
2	Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan	1.395.965.000	1.348.333.962	96,59
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.395.965.000	1.348.333.962	96,59
	2.1 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1.395.965.000	1.348.333.962	96,59
3	Program Pengawasan Keamanan Pangan	778.865.000	769.840.212	98,84
	3.1 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	778.865.000	769.840.212	98,84
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			
	4.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	320.901.000	307.226.054	95,74
	4.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.899.929.000	14.126.762.555	94,81
	4.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	108.940.000	107.583.431	98,75
	4.4 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	2.803.000	1.796.000	64,07
	4.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	98.129.000	96.086.560	97,92
	4.6 Administrasi Umum Perangkat Daerah	594.504.000	584.752.270	98,36

	4.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.393.875.000	1.177.720.849	84,49
	4.8 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	704.600.000	693.600.000	98,44
	4.9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	547.806.000	533.757.432	97,44

Apabila ditinjau dari sisi penyerapan, anggaran sebesar Rp 47.104.866.000,- terserap Rp. 45.964.951.803,- (97,8%). Sisa anggaran Rp. 1.139.914.197,- (2,2%) berasal dari:

Realisasi serapan anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar 97,80% dapat dikategorikan **Sangat Tinggi**, capaian tersebut naik dibandingkan tahun 2024 yaitu sebesar 97,03%.

Dalam menunjang pencapaian sasaran tahun 2025 pelaksanaan program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai rencana yang ditetapkan sehingga dengan tercapainya indikator sasaran maka sisa anggaran dapat dikategorikan sebagai efisiensi karena berasal dari selisih atas negosiasi belanja barang dan jasa serta optimalisasi perjalanan dinas.

3.3 Inovasi

Dalam rangka stabilisasi harga ataupun pengendalian inflasi khususnya pangan, maka diperlukan adanya program untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau yaitu Kios Pangan Murah. Kios Pangan Murah memiliki peran penting dalam mengendalikan inflasi harga bahan pokok. Di banyak daerah, fluktuasi harga pangan bisa sangat mempengaruhi daya beli masyarakat, terutama pada musim-musim tertentu atau saat terjadi kelangkaan barang. Melalui kios pangan murah, pemerintah dapat memastikan ketersediaan barang dengan harga yang stabil, sekaligus mengurangi dampak negatif dari lonjakan harga yang dapat membebani keluarga miskin. Selain itu, kios ini juga sering dijalankan dengan konsep yang lebih transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat merasa lebih aman dan percaya. Dengan adanya kios pangan murah, harga barang-barang kebutuhan dasar seperti beras, minyak goreng, gula, dan bahan pangan lainnya dijual dengan harga yang lebih rendah dari pasaran, sehingga memudahkan masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Komoditas tersebut dipilih karena memang merupakan bahan pangan strategis yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat serta masih memungkinkan untuk disimpan dalam jangka waktu tertentu pada suhu ruang. Selain itu, mengingat mayoritas Kios Pangan Murah ada di lokasi miskin/rawan pangan, dipilih telur karena dapat meningkatkan konsumsi protein hewani bagi masyarakat yang harganya lebih terjangkau dibanding sumber protein hewani lainnya. Untuk bahan pangan yang mudah rusak seperti cabai, bawang merah, daging ayam dan daging sapi tidak

disarankan untuk disediakan di Kios Pangan Murah karena sebagian besar Kios Pangan Murah belum memiliki Sarana Prasarana Penyimpanan yang memadai.

Pada tahun 2025, berdasarkan usulan dari Kabupaten/Kota maupun OPD Provinsi Jawa Tengah sebanyak 508 kios di 27 Kabupaten/Kota. Kios Pangan Murah tersebut terdiri kios lanjutan tahun 2024 dan usulan baru tahun 2025, yang ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah No. 500/1.3.1/0050 tanggal 20 Januari 2025 tentang Penetapan Kios Pangan Murah (KPM) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dan telah dilakukan perubahan terakhir dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah No. 500.1.3.1/0736.1 tanggal 15 September 2026 tentang Perubahan Ketiga atas SK Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah No. 500/1.3.1/0050 tanggal 20 Januari 2025 tentang Penetapan Kios Pangan Murah (KPM) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sebagaimana pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11. Sebaran Kios Pangan Murah di Kabupaten/Kota se Jawa Tengah

No.	Kabupaten/Kota	KPM 2025
1	Banjarnegara	50
2	Banyumas	11
3	Blora	15
4	Boyolali	1
5	Brebes	22
6	Cilacap	7
7	Demak	17
8	Jepara	25
9	Karanganyar	1
10	Kebumen	20
11	Kendal	8
12	Klaten	23
13	Kota Semarang	8
14	Kota Surakarta	7
15	Kudus	3
16	Magelang	48
17	Pati	54
18	Purbalingga	20
19	Purworejo	13
20	Rembang	37
21	Semarang	8
22	Sragen	11
23	Sukoharjo	21
24	Tegal	2
25	Temanggung	2
26	Wonogiri	60
27	Wonosobo	14
TOTAL		508

3.4 Penghargaan

Dinas Ketahanan Pangan mendapatkan beberapa penghargaan pada tahun 2025, yaitu sebagai berikut:

1. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah kembali meraih penghargaan Blankon Award Tahun 2025 (Kamis, 21/08/2025). Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah memperoleh juara III dalam kategori Badan/Dinas/Biro Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan presentase belanja tertinggi, setelah Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah sebagai juara I dan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah sebagai juara II. Penghargaan ini diserahkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Dyah Lukisari. Penghargaan ini membuktikan komitmen Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah sebagai Dinas yang berkontribusi aktif dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik demi memberdayakan UMKM yang ada di Jawa Tengah.

Gambar 3.1 Penerimaan Penghargaan Blankon Award Tahun 2025



2. Penghargaan untuk provinsi dengan capaian penurunan angka Prevalence of Undernourishment (PoU) terbaik tahun 2024 secara resmi diumumkan. Provinsi Jawa Tengah mendapatkan Penghargaan Provinsi dengan Capaian Penurunan Angka Prevalence of Undernourishment (PoU) Terbaik III Tahun 2024. (Kamis, 14/8/2025) PoU merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kerawanan pangan di suatu wilayah. Penurunan angka PoU menunjukkan perbaikan kondisi ketersediaan dan akses pangan bagi masyarakat. Angka PoU Jawa Tengah pada tahun 2024 adalah 8,63%, mengalami perbaikan dari tahun 2023 yang sebesar 10,44%. Penghargaan ini membuktikan bahwa strategi, program, dan inovasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membawa dampak positif bagi masyarakat. Lebih lanjut, penghargaan ini semakin memperkuat semangat untuk terus meningkatkan pengelolaan ketahanan pangan, serta memberikan dorongan positif bagi upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah..

Gambar 3.2 Penerimaan Penghargaan untuk Provinsi dengan capaian penurunan angka Prevalence of Undernourishment (PoU) Terbaik III Tahun 2024



3. Dishanpan Prov Jateng memperoleh Juara 2 di kategori Belanja Non Tunai Terbaik Tahun 2025. (Selasa, 29/7/2025). Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan TNT (Transaksi Non Tunai) Award Tahun 2025 dengan 3 nominasi yaitu kategori (Belanja Non Tunai Terbaik, KKPD Terbaik, Pendapatan Non Tunai Terbaik).Adanya Award ini untuk meningkatkan semangat dan mendorong peningkatan dalam penyelenggaraan transaksi non tunai menggunakan QRIS, Kartu Kredit Pemerintah, CMS, M-Banking (Transaksi Digital) untuk seluruh SKPD di lingkungan Pemprov Jateng.

Gambar 3.3 Penerimaan Penghargaan Juara 2 Kategori Belanja Non Tunai Terbaik Tahun 2025



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dinas Ketahanan Pangan (DISHANPAN) Provinsi Jawa Tengah telah berhasil dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan **Istimewa**. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut:
 - a. Capaian kinerja **tujuan 1** mewujudkan ketahanan pangan jawa tengah tercapai sebesar **86,26%** atau kategori **Baik**.
 - b. Capaian kinerja **sasaran 1** meningkatkan ketersediaan pangan tercapai sebesar **105,64%** atau kategori **Istimewa**.
 - c. Capaian kinerja **sasaran 2** meningkatkan keterjangkauan/akses pangan tercapai sebesar **306,51 %** atau kategori **Istimewa**.
 - d. Capaian kinerja **sasaran 3** meningkatkan keterjangkauan/akses pangan tercapai sebesar **104,16%** atau kategori **Istimewa**.
 - e. Capaian kinerja **sasaran 4** meningkatkan pemanfaatan pangan tercapai sebesar **102,86 %** atau kategori **Istimewa**,
 - f. Capaian kinerja **tujuan 2** meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah tercapai sebesar **102,43 %** atau kategori **Istimewa**.
 - g. Capaian kinerja **sasaran 5** meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah tercapai sebesar **104,81%** atau kategori **Istimewa**.
 - h. Capaian kinerja **sasaran 6** meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah tercapai sebesar **107,65%** atau kategori **Istimewa**.
2. Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 antara lain:
 - a. Terjadinya gejolak harga akibat inflasi pada wilayah tertentu di tingkat produsen dan konsumen, fluktuasi pasokan pangan pokok strategis dan rantai pasok yang cukup panjang dari produsen ke konsumen.
 - b. Masih adanya daerah rawan pangan dan anak stunting di Jawa Tengah yang disebabkan oleh berbagai faktor antara lain kemiskinan, keterbatasan infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumber daya yang rendah dan bencana alam.
 - c. Penurunan konsumsi beras namun belum diimbangi dengan peningkatan konsumsi komoditas pangan lainnya secara beragam seperti umbi-umbian, buah/biji berminyak, dan kacang-kacangan.
 - d. Tingginya *food waste* dan *loss*.

- f. Terbatasnya data pelaku usaha Pangan Segar Asal Tanaman (PSAT) dan kelompok tani organik serta perlu adanya kerjasama dengan instansi lain dalam mempromosikan keamanan pangan segar.
- g. Masih banyak beredarnya pangan segar asal tumbuhan yang belum aman karena belum tersertifikasi.

B. Rekomendasi

Strategi yang dilakukan guna meningkatkan kinerja DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah di masa mendatang antara lain:

1. Penguatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dengan kegiatan gelar Pangan Murah, Subsidi Harga Pangan Tingkat produsen dan konsumen serta Kios Pangan Murah.
2. Penanggulangan rawan pangan dan anak beresiko stunting (*underweight*) melalui subsidi harga pangan sumber energi. Subsidi diberikan kepada masyarakat di wilayah dengan angka *Prevelence of Undernourishment* (PoU) tinggi dan daerah dengan resiko stunting tinggi.
3. Peningkatan konsumsi pangan non beras melalui penguatan umkm pangan lokal, kampanye Pangan B2SA, Edukasi pangan B2SA, hingga subsidi pangan lokal.
4. Kolaborasi penanganan *Food loss* dan *waste* melalui edukasi, sosialisasi, penanganan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat, dan implementasi instruksi gubernur tentang penanganan *Food loss* dan *wast*.
5. Pembentukan database pelaku Pangan Segar Asal Tumbuhan dengan melibatkan lintas instansi, serta promosi pangan segar dan organik melalui subsidi pangan organik.
6. Pengawasan Keamanan pangan baik *pre market* maupun *post market* dengan melibatkan seluruh *stakeholder*.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Ungaran, Januari 2026

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH



Ir. DYAH LUKISARI, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19661016 199203 2 006



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Gatot Subroto Komplek Tarubudaya Ungaran Telepon 024-6921972,6925554

Faksimile 024-6921997 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik dishanpan@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. DYAH LUKISARI, M.Si.

Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. Ahmad Luthfi., S.H., S.St.M.K

Jabatan : Gubernur Jawa Tengah

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 01 Oktober 2025

Pihak Kedua,
GUBERNUR JAWA TENGAH



Drs. Ahmad Luthfi., S.H., S.St.M.K

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Ir. DYAH LUKISARI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661016 199203 2 006

Program	Anggaran	Keterangan
7. Program Peningkatan Diversifikasi & Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 18.903.525.000	APBD
8. Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp 1.829.123.000	APBD
9. Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp 7.055.935.000	APBD
10. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 19.316.283.000	APBD
11. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp 508.325.000	APBN
12. Program Dukungan Manajemen	Rp 44.408.000	APBN

Semarang, 01 Oktober 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH



Drs. Ahmad Luthfi., S.H., S.St.M.K

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Ir. DYAH LUKISARI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661016 199203 2 006



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Gatot Subroto Komplek Tarubudaya Ungaran Telepon 024-6921972,6925554

Faksimile 024-6921997 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik dishanpan@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SRI BROTO RINI, SP., MP

Jabatan : Plt. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. DYAH LUKISARI, M.Si.

Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ungaran, 01 Oktober 2025

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Ir. DYAH LUKISARI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661016 199203 2 006

Pihak Pertama,
Plt. SEKRETARIS DINAS
KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

SRI BROTO RINI, SP., MP
Pembina
NIP. 19700520 199503 2 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Plt. SEKRETARIS DINAS

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tercapainya kinerja perangkat daerah	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100 %
2.	Terselenggaranya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 18.671.487.000	APBD
2. Program Dukungan Manajemen	Rp 44.408.000	APBN

Ungaran, 01 Oktober 2025

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH



Ir. DYAH LUKISARI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661016 199203 2 006

Plt. SEKRETARIS DINAS
KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH



SRI BROTO RINI, SP., MP
Pembina
NIP. 19700520 199503 2 002



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Gatot Subroto Komplek Tarubudaya Ungaran Telepon 024-6921972,6925554

Faksimile 024-6921997 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik dishanpan@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. SLAMET EKO PRASTIYO, S.P., M.Si.

Jabatan : Plt. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SRI BROTO RINI S.P., M.P.

Jabatan : Plt. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ungaran, 01 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Plt. SEKRETARIS DINAS
KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

SRI BROTO RINI, SP., MP
Pembina
NIP. 19700520 199503 2 002

Pihak Pertama,
Plt. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

Dr. SLAMET EKO PRASTIYO, S.P., M.Si.
Pembina
NIP. 19810925 200604 1 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

No	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	2 Dokumen
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	2 Dokumen
		Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	4 Laporan
2.	Terlaksananya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	100%
		Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	12 Dokumen
3.	Terlaksananya layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100%
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Paket
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 Paket
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 Paket
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan

No	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	1 Laporan
		Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	12 Dokumen
4.	Tersusunnya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	24 Laporan
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan
5.	Terpeliharanya unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	84 Unit
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	23 Unit
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit
		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi/dibangun	60 Unit
6.	Tersedianya unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	7 Unit

No	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	15 Unit

Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
A. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp	108.940.000	APBD
1. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp	100.000.000	APBD
2. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp	8.940.000	APBD
B. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp	98.129.000	APBD
1. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp	98.129.000	APBD
C. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	594.504.000	APBD
1. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	45.593.000	APBD
2. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	47.567.000	APBD
3. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	24.052.000	APBD

Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
4. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp	49.370.000	APBD
5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	325.000.000	APBD
6. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp	8.816.000	APBD
7. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp	94.106.000	APBD
D. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	1.393.875.000	APBD
1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	414.000.000	APBD
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	979.875.000	APBD
E. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	547.806.000	APBD
1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	213.781.000	APBD
2. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	295.165.000	APBD

Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	38.860.000	APBD
F. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	704.600.000	APBD
1. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	704.600.000	APBD

Plt. SEKRETARIS DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH



SRI BROTO RINI, SP., MP
Pembina
NIP. 19700520 199503 2 002

Ungaran, 01 Oktober 2025
Plt. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN



Dr. SLAMET EKO PRASTIYO, S.P., M.Si.
Pembina
NIP. 19810925 200604 1 003



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Gatot Subroto Komplek Tarubudaya Ungaran Telepon 024-6921972,6925554

Faksimile 024-6921997 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik dishanpan@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. SLAMET EKO PRASTIYO, S.P., M.Si.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Program

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SRI BROTO RINI, S.P., M.P

Jabatan : Plt. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ungaran, 01 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Plt. SEKRETARIS DINAS
KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

SRI BROTO RINI, SP., MP

Pembina

NIP. 19700520 199503 2 002

Pihak Pertama,
KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM

Dr. SLAMET EKO PRASTIYO, S.P., M.Si.

Pembina

NIP. 19810925 200604 1 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM

No	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan perundangan	Persentase Dokumen Perencanaan, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	100 %
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18 Laporan

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 320.901.000	APBD
3. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 225.637.000	APBD
4. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 95.264.000	APBD

Plt. SEKRETARIS DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH



SRI BROTO RINI, SP., MP
Pembina
NIP. 19700520 199503 2 002

Ungaran, 01 Oktober 2025
KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM



Dr. SLAMET EKO PRASTIYO, S.P., M.Si.
Pembina
NIP. 19810925 200604 1 003



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Gatot Subroto Komplek Tarubudaya Ungaran Telepon 024-6921972,6925554

Faksimile 024-6921997 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik dishanpan@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ZAENAL ARIFIN, S.P., M.P

Jabatan : Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SRI BROTO RINI S.P., M.P.

Jabatan : Plt. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ungaran, 01 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Plt. SEKRETARIS DINAS
KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

SRI BROTO RINI, SP., MP
Pembina
NIP. 19700520 199503 2 002

Pihak Pertama,
Plt. KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

ZAENAL ARIFIN, S.P., M.P
Penata Tingkat I
NIP. 19851016 200903 1 006

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

No	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	3 Dokumen
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	93 Orang
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen
		Jumlah dokumen laporan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	12 Laporan
2.	Tersusunnya laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	1 Laporan
		Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan

Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
A. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	14.899.929.000	APBD
1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	14.254.439.000	APBD
2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp	376.274.000	APBD
3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp	269.216.000	APBD
B. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Rp	2.803.000	APBD
1. Sub Kegiatan Pengolahan Data Retribusi Daerah	Rp	2.803.000	APBD

Plt. SEKRETARIS DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH



SRI BROTO RINI, SP., MP
Pembina
NIP. 19700520 199503 2 002

Ungaran, 01 Oktober 2025
Plt. KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN



ZAENAL ARIFIN, S.P., M.P
Penata Tingkat I
NIP. 19851016 200903 1 006



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Gatot Subroto Komplek Tarubudaya Ungaran Telepon 024-6921972, 6925554
Faksimile 024-6921997 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik dishanpan@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : URIP ARIANI SETYORAHAYU, SPi

Jabatan : Plt. Kepala Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. DYAH LUKISARI, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ungaran, 01 Oktober 2025

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH


Ir. DYAH LUKISARI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661016 199203 2 006

Pihak Pertama,
Plt. KEPALA BIDANG
KERAWANAN PANGAN DAN GIZI


URIP ARIANI SETYORAHAYU, SPi
Penata Tingkat I
NIP. 19681104 199403 2 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

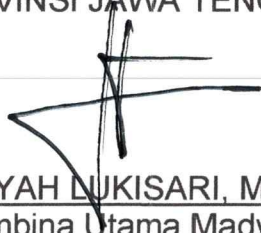
Unit Kerja: BIDANG KERAWANAN PANGAN DAN GIZI

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Menurunnya Daerah Rawan Pangan dan Gizi	Persentase Penurunan Daerah Rawan Pangan dan Gizi	0.01 %
No	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tertanganinya Desa Rawan Pangan dan Gizi di Jawa Tengah	Persentase Penanganan Desa Rawan Pangan dan Gizi	5.5%
		Tersusunnya Peta Fsva	1 Dokumen
		Jumlah Desa Rawan Pangan dan Gizi yang Difasilitasi	30 Desa
		Tersusunnya Rekomendasi Kebutuhan Kerawanan Pangan Lintas Sektor	1 Dokumen

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp 7.055.935.000	APBD
2. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp 89.825.000	APBN

Ungaran, 01 Oktober 2025

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH



Ir. DYAH NUKISARI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661016 199203 2 006

Pihak Pertama,
Plt. KEPALA BIDANG
KERAWANAN PANGAN DAN GIZI



URIP ARIANI SETYORAHAYU, SPI
Penata Tingkat I
NIP. 19681104 199403 2 002



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Gatot Subroto Komplek Tarubudaya Ungaran Telepon 024-6921972, 6925554
Faksimile 024-6921997 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik dishanpan@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHANTAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : URIP ARIANI SETYORAHAYU, S.Pi

Jabatan : Ketua Kelompok Kerja Kewaspadaan Pangan Dan Gizi

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : URIP ARIANI SETYORAHAYU, S.Pi

Jabatan : Plt. Kepala Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Plt. KEPALA BIDANG
KERAWANAN PANGAN DAN GIZI

URIP ARIANI SETYORAHAYU, S.Pi
Penata Tingkat I
NIP. 19681104 199403 2 002

Ungaran, 01 Oktober 2025

Pihak Pertama,
KETUA KELOMPOK KERJA
KEWASPADAAN PANGAN DAN
GIZI

URIP ARIANI SETYORAHAYU, S.Pi
Penata Tingkat I
NIP. 19681104 199403 2 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHANTAHUN 2025

Unit Kerja : KETUA KELOMPOK KERJA KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI

No	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tertanganinya Desa Rawan Pangan dan Gizi di Jawa Tengah	Persentase Penanganan Desa Rawan Pangan dan Gizi	5.5%
		Tersusunnya Dokumen Menejemen <i>Food Loss</i> dan Atau <i>Food Waste</i>	1 Dokumen

	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
A	Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi		
1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Rp 226.835.000	APBD

Ungaran, 01 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Plt. KEPALA BIDANG
KERAWANAN PANGAN DAN GIZI



URIP ARIANI SETYORAHAYU, S.Pi
Penata Tingkat I
NIP. 19681104 199403 2 002

Pihak Pertama,
KETUA KELOMPOK KERJA
KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI



URIP ARIANI SETYORAHAYU, S.Pi
Penata Tingkat I
NIP. 19681104 199403 2 002



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Gatot Subroto Komplek Tarubudaya Ungaran Telepon 024-6921972, 6925554
Faksimile 024-6921997 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik dishanpan@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHANTAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FIRDAUS ELIYAKA S., SP., M.Si.

Jabatan : Ketua Kelompok Kerja Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : URIP ARIANI SETYORAHAYU, S.Pi

Jabatan : Plt. Kepala Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Plt. KEPALA BIDANG
KERAWANAN PANGAN DAN GIZI

URIP ARIANI SETYORAHAYU, S.Pi
Penata Tingkat I
NIP. 19681104 199403 2 002

Ungaran, 01 Oktober 2025

Pihak Pertama,
KETUA KELOMPOK KERJA
PENANGANAN KERAWANAN
PANGAN DAN GIZI

FIRDAUS ELIYAKA S., SP., M.Si.
Pembina
NIP. 19721001 200604 1 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Unit Kerja : KETUA KELOMPOK KERJA PENANGANAN KERAWANAN PANGAN DAN GIZI

No	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tertanganinya Desa Rawan Pangan dan Gizi di Jawa Tengah	Persentase Penanganan Desa Rawan Pangan dan Gizi	5.5%
		Jumlah Desa Stunting yang Diintervensi	40 Desa
		Tersusunnya Peta Kewaspadaan Pangan dan Gizi	12 Dokumen

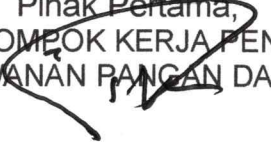
Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
A Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi		
1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Rp 46.911.000	APBD

Pihak Kedua,
Plt. KEPALA BIDANG
KERAWANAN PANGAN DAN GIZI


URIP ARIANI SETYORAHAYU, S.Pi
Penata Tingkat I
NIP. 19681104 199403 2 002

Ungaran, 01 Oktober 2025

Pihak Pertama,
KETUA KELOMPOK KERJA PENANGANAN
KERAWANAN PANGAN DAN GIZI


FIRDAUS ELIYAKA S.SP, M.Si.
Pembina
NIP. 19721001 200604 1 003



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Gatot Subroto Komplek Tarubudaya Ungaran Telepon 024-6921972, 6925554
Faksimile 024-6921997 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik dishanpan@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SRI BROTO RINI, SP, MP

Jabatan : Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. DYAH LUKISARI, M.Si.

Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Ir. DYAH LUKISARI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661016 199203 2 006

Ungaran, 01 Oktober 2025

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG
KETERSEDIAAN DAN
STABILISASI PANGAN

SRI BROTO RINI, SP, MP
Pembina Tingkat I
NIP. 19700520 199503 2 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

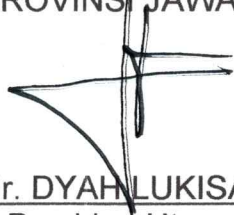
Unit Kerja : BIDANG KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tercapainya Rata-rata Angka ketercukupan pangan	Rata-rata ketercukupan pangan	1,25 Angka
		Jumlah Dokumen Rekomendasi Ketersediaan Pangan yang Diusulkan	1 Dokumen
		Jumlah Laporan Ketersediaan Pangan Yang Disusun	12 Dokumen
2.	Tersedianya Jumlah cadangan pangan pemerintah provinsi yang dikelola / jumlah ideal	Rasio penyediaan cadangan pangan pemerintah provinsi	0,45 Angka
3.	Tercapainya persentase komoditas pangan strategis dengan harga efektif sesuai ketentuan yang berlaku dimana ketentuan harga menggunakan peraturan ka bapanas / permendag	Persentase komoditas pangan strategis dengan harga efektif sesuai ketentuan yang berlaku	55 %

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 17.507.560.000	APBD
2	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp 150.000.000	APBN

Ungaran, 01 Oktober 2025

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH



Ir. DYAH LUKISARI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661016 199203 2 006

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG
KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN



SRI BROTO RINI, SP, MP
Pembina Tingkat I
NIP. 19700520 199503 2 002



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Gatot Subroto Komplek Tarubudaya Ungaran Telepon 024-6921972, 6925554
Faksimile 024-6921997 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik dishanpan@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HERDINI NUR AIRIANIK, STP, M.Si

Jabatan : Ketua Kelompok Kerja Distribusi dan Cadangan Pangan
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SRI BROTO RINI, SP, MP

Jabatan : Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG
KETERSEDIAAN DAN STABILISASI
PANGAN

SRI BROTO RINI, SP, MP
Pembina Tingkat I
NIP. 19700520 199503 2 002

Ungaran, 01 Oktober 2025

Pihak Pertama,
KETUA KELOMPOK KERJA
DISTRIBUSI DAN CADANGAN
PANGAN

HERDINI NUR AIRIANIK, STP, M.Si
Pembina
NIP. 19861126 201101 1 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Unit Kerja : KELOMPOK KERJA DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN

No	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bahan pangan yang didistribusikan untuk stabilisasi harga	Persentase peningkatan volume bahan pangan yang didistribusikan untuk stabilisasi harga	120%
		Jumlah dokumen pelaksanaan distribusi pangan melalui sistem logistik daerah	12 Dokumen
		Volume bahan pangan yang difasilitasi pendistribusiannya untuk stabilisasi pasokan	2.450 Ton
2	Peningkatan volume cadangan pangan pemerintah provinsi	Persentase peningkatan volume cadangan pangan pemerintah provinsi	20%
		Jumlah cadangan pangan pemerintah yang dikelola	420 Ton

	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
A	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		
1.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Rp 3.932.287.000	APBD
B	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi		
1.	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Rp 7.651.621.000	APBD

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG
KETERSEDIAAN DAN STABILISASI
PANGAN



SRI BROTO RINI, SP, MP
Pembina Tingkat I
NIP. 19700520 199503 2 002

Ungaran, 01 Oktober 2025

Pihak Pertama,
KETUA KELOMPOK KERJA
DISTRIBUSI DAN CADANGAN
PANGAN



HERDINI NUR AIRIANIK, STP, M.Si
Pembina
NIP. 19830228 200604 2 006



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Gatot Subroto Komplek Tarubudaya Ungaran Telepon 024-6921972, 6925554
Faksimile 024-6921997 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik dishanpan@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DHANI SARDONO WIYOTO, S,TP, MM

Jabatan : Ketua Kelompok Kerja Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SRI BROTO RINI, SP, MP

Jabatan : Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG
KETERSEDIAAN DAN STABILISASI
PANGAN

SRI BROTO RINI, SP, MP
Pembina Tingkat I
NIP. 19700520 199503 2 002

Ungaran, 01 Oktober 2025

Pihak Pertama,
KETUA KELOMPOK KERJA
STABILISASI PASOKAN DAN
HARGA PANGAN

DHANI SARDONO W, S,TP, MM
Penata Tingkat I
NIP. 19801017 201001 1 004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Unit Kerja : KELOMPOK KERJA STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN

No	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Jumlah intervensi stabilisasi harga	Prosentase sasaran stabilisasi harga sesuai dengan sop	100%
		Jumlah informasi harga pangan	12 Dokumen
		Jumlah intervensi harga pangan	5 Paket

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
A Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		
1. Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Rp 5.890.000.000	APBD

Ungaran, 01 Oktober 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG
KETERSEDIAAN DAN STABILISASI
PANGAN



SRI BROTO RINI, SP, MP
Pembina Tingkat I
NIP. 19700520 199503 2 002

Pihak Pertama,
KETUA KELOMPOK KERJA STABILISASI
PASOKAN DAN
HARGA PANGAN



DHANI SARDONO W, S,TP, MM
Penata Tingkat I
NIP. 19801017 201001 1 004



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Gatot Subroto Komplek Tarubudaya Ungaran Telepon 024-6921972, 6925554
Faksimile 024-6921997 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik dishanpan@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LUCIA SRI WINARNI SUSILOWATI, SE, M.Si.

Jabatan : Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. DYAH LUKISARI, M.Si.

Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Ir. DYAH LUKISARI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661016 199203 2 006

Ungaran, 01 Oktober 2025

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG
PENGANEKARAGAMAN
KONSUMSI PANGAN

LUCIA SRI WINARNI S. SE., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700907 199903 2 007

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Unit Kerja : BIDANG PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Berkurangnya Konsumsi Beras Masyarakat Provinsi Jawa Tengah	Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah (DRP)	87.7 Kg/Kap/Th
		Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah	87.7 Kg/Kap/Th
No	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tercapainya Skor PPH di Kabupaten/Kota > 87	PPH Kab/Kota > 87	34 Angka
		Jumlah lokasi yang diberikan promosi/edukasi B2SA dan pangan lokal	4 Lokasi
		Jumlah Paket Bahan Pangan Lokal Yang Dibagikan / Dibantukan	500 Paket
		Jumlah Desa B2SA Yang Difasilitasi	5 Desa
		Jumlah Dokumen Analisis PPH	1 Dokumen
2.	Tercapainya Skor PPH di Kabupaten/Kota (DRP) > 87	PPH Kab/Kota > 87 (DRP)	34 Angka
		Jumlah Desa B2SA Di Daerah Rawan Pangan Yang Difasilitasi	5 Desa

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 1.395.965.000	APBD
2	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp 138.500.000	APBN

Ungaran, 01 Oktober 2025

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH



Ir. DYAH LUKISARI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661016 199203 2 006

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG
PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI
PANGAN



LUCIA SRI WINARNI S. SE., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700907 199903 2 007



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Gatot Subroto Komplek Tarubudaya Ungaran Telepon 024-6921972, 6925554
Faksimile 024-6921997 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik dishanpan@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FERRY AGUS SETIAWAN, S.Pt, MM.

Jabatan : Ketua Kelompok Kerja Pengembangan Pangan Lokal
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : LUCIA SRI WINARNI SUSILOWATI, SE, M.Si.

Jabatan : Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan
selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ungaran, 01 Oktober 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG
PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI
PANGAN


LUCIA SRI WINARNI S. SE., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700907 199903 2 007

Pihak Pertama,
KETUA KELOMPOK KERJA
PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL


FERRY AGUS SETIAWAN, S.Pt, MM
Penata Tingkat I
NIP. 19861126 201101 1 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Unit Kerja: KETUA KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL

No	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersusunnya Rekomendasi Ketersediaan Sumber daya Pangan Lokal	Rekomendasi Ketersediaan Sumber daya Pangan Lokal yang Disusun	1 Dokumen
		Jumlah kelompok / Pelaku Usaha Pengembangan Pangan Olahan Lokal dan Pangan Pokok Lokal yang Difasilitasi	12 Kelompok

	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
A	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		
1	Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Rp 894.057.000	APBD

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG
PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI
PANGAN



LUCIA SRI WINARNI S. SE., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700907 199903 2 007

Ungaran, 01 Oktober 2025

Pihak Pertama
KETUA KELOMPOK KERJA
PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL



FERRY AGUS SETIAWAN, S.Pt, MM
Penata Tingkat I
NIP. 19861126 201101 1 003



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Gatot Subroto Komplek Tarubudaya Ungaran Telepon 024-6921972, 6925554
Faksimile 024-6921997 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik dishanpan@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LISTYA PUSPITASARI, SP, M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Keamanan Pangan
selanjutnya disebut Pihak Pertama

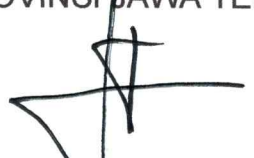
Nama : Ir. DYAH LUKISARI, M.Si.

Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH


Ir. DYAH LUKISARI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661016 199203 2 006

Ungaran, 01 Oktober 2025

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG
KEAMANAN PANGAN


LISTYA PUSPITASARI, SP, M.Si
Pembina
NIP. 19780715 201001 2 019

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Unit Kerja : BIDANG KEAMANAN PANGAN

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan	90 %
No	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terawasinya Produk Pangan Segar yang Teregistrasi di Peredaran	Persentase Produk Pangan Segar Teregistrasi yang diawasi di Peredaran	67%
		Jumlah Sampel Pangan Segar Yang Diawasi	500 Sampel
		Jumlah dokumen rekomendasi keamanan pangan segar yang disusun	1 Dokumen
		Jumlah Lokasi Pengawasan Ijin Edar	20 Lokasi

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program pengawasan keamanan pangan	Rp 778.865.000	APBD
2	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp 130.000.000	APBN

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH



Ir. DYAH LUKISARI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661016 199203 2 006

Ungaran, 01 Oktober 2025

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG
KEAMANAN PANGAN



LISTYA PUSPITASARI, SP, M.Si
Pembina
NIP. 19780715 201001 2 019



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Gatot Subroto Komplek Tarubudaya Ungaran Telepon 024-6921972, 6925554
Faksimile 024-6921997 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik dishanpan@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NETI SETYO MAHANANI, SP

Jabatan : Ketua Kelompok Kerja Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : LISTYA PUSPITASARI, SP, M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Keamanan Pangan

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ungaran, 01 Oktober 2025

Pihak Pertama,
KETUA KELOMPOK KERJA
KERJASAMA DAN INFORMASI
KEAMANAN PANGAN

NETI SETYO MAHANANI, SP
Penata Tingkat I
NIP. 19820626 201001 2 019

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG
KEAMANAN PANGAN

LISTYA PUSPITASARI, SP, M.Si
Pembina
NIP. 19780715 201001 2 019

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Unit Kerja : KELOMPOK KERJA KERJASAMA DAN INFORMASI KEAMANAN PANGAN

No	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersusunnya Dokumen Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah dokumen rekomendasi keamanan pangan segar yang disusun	1 Dokumen
		Jumlah masyarakat yang teredukasi tentang mutu dan keamanan pangan	250 Orang

Sub Kegiatan

Anggaran

Keterangan

A Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas daerah kabupaten/kota

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan

Rp 144.813.000

APBD

Ungaran, 01 Oktober 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG
KEAMANAN PANGAN



LISTYA PUSPITASARI, SP, M.Si
Pembina
NIP. 19780715 201001 2 019

Pihak Pertama,
KETUA KELOMPOK KERJA
KERJASAMA DAN INFORMASI KEAMANAN
PANGAN



NETI SETYO MAHANANI, SP
Penata Tingkat I
NIP. 19820626 201001 2 019



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Gatot Subroto Komplek Tarubudaya Ungaran Telepon 024-6921972, 6925554
Faksimile 024-6921997 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik dishanpan@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ZAENAL ARIFIN, SP, MP

Jabatan : Ketua Kelompok Kerja Kelembagaan Keamanan Pangan
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : LISTYA PUSPITASARI, SP, M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Keamanan Pangan

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG
KEAMANAN PANGAN

LISTYA PUSPITASARI, SP, M.Si

Pembina

NIP. 197807152010012019

Ungaran, 01 Oktober 2025

Pihak Pertama,
KETUA KELOMPOK KERJA
KELEMBAGAAN KEAMANAN
PANGAN

ZAENAL ARIFIN, SP, MP

Penata Tingkat I

NIP. 198510162009031006

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Unit Kerja : KELOMPOK KERJA KELEMBAGAAN KEAMANAN PANGAN

No	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Penerapan Higiene Sanitasi pada Kelompok / Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan	Prosentase kelompok / pelaku usaha yang penerapan higiene sanitasinya meningkat levelnya	20%
		Jumlah kelompok yang didampingi dalam penyusunan doksistu	3 Kelompok
		Jumlah pelaku usaha yang dibina dalam penerapan higiene sanitasi	20 Kelompok

Sub Kegiatan

Anggaran

Keterangan

A Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas daerah

kabupaten/kota

1. Penguatan kelembagaan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan

Rp 174.316.000

APBD

Ungaran, 01 Oktober 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG
KEAMANAN PANGAN



LISTYA PUSPITASARI, SP, M.Si

Pembina

NIP. 19780715 201001 2 019

Pihak Pertama,
KETUA KELOMPOK KERJA
KELEMBAGAAN KEAMANAN PANGAN



ZAENAL ARIFIN, SP, MP

Penata Tingkat I

NIP. 19851016 200903 1 006



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Gatot Subroto Komplek Tarubudaya Ungaran Telepon 024-6921972, 6925554
Faksimile 024-6921997 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik dishanpan@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUHARSO, SP., M.Si

Jabatan : Plt. Kepala Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
selanjutnya disebut Pihak Pertama

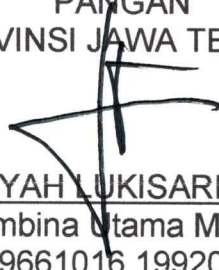
Nama : Ir. DYAH LUKISARI, M.Si.

Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

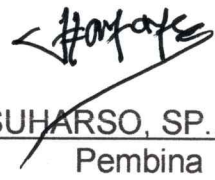
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS KETAHANAN
PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH


Ir. DYAH LUKISARI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661016 199203 2 006

Ungaran, 01 Oktober 2025

Pihak Pertama,
Plt. Kepala Balai Peningkatan Mutu dan
Keamanan Pangan


SUHARSO, SP., M.Si
Pembina
NIP. 19690302 199103 1 010

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Unit Kerja : BALAI PENINGKATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mengukur rata-rata dari tingkat ketercapaian kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	Persentase tingkat Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah di BPMKP	100%
2	Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	Persentase Rekomendasi Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan yang Diterbitkan	80%
No.	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksanya Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan sesuai ISO 17065 dan ISO 17025	Jumlah sertifikat jaminan mutu dan keamanan pangan pada balai	2 Dokumen
		Jumlah Dokumen Sertifikat dan/atau Registrasi yang Diterbitkan	50 Dokumen

Program	Anggaran	Keterangan
Program pengawasan keamanan pangan	Rp 1.050.258.000	APBD
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp 644.796.000	APBD

Ungaran, 01 Oktober 2025

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH



Ir. DYAH LUKISARI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661016 199203 2 006

Pihak Pertama,
Plt. Kepala Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan
Pangan



SUHARSO, SP., M.Si
Pembina
NIP. 19690302 199103 1 010



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Gatot Subroto Komplek Tarubudaya Ungaran Telepon 024-6921972, 6925554
Faksimile 024-6921997 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik dishanpan@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUHARSO, SP., M.Si

Jabatan : Ketua Kelompok Kerja Pengujian Pangan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SUHARSO, SP., M.Si

Jabatan : Plt. Kepala Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Plt. KEPALA BALAI PENINGKATAN
MUTU DAN
KEAMANAN PANGAN

SUHARSO, SP., M.Si
Pembina
NIP. 19690302 199103 1 010

Ungaran, 01 Oktober 2025

Pihak Pertama,
KETUA KELOMPOK KERJA
PENGUJIAN PANGAN

SUHARSO, SP., M.Si
Pembina
NIP. 19690302 199103 1 010

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Unit Kerja : KELOMPOK KERJA PENGUJIAN PANGAN

No	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksanya Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan sesuai ISO 17065 dan ISO 17025	Jumlah sertifikat jaminan mutu dan keamanan pangan pada balai	2 Dokumen
		Jumlah Sampel Pangan yang diuji	90 Sampel

Sub Kegiatan

A Pelaksanaan pengawasan kewanamanan pangan segar distribusi lintas daerah kabupaten/kota

1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan

Anggaran

Rp 783.280.000

Keterangan

APBD

Ungaran, 01 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Plt. KEPALA BALAI PENINGKATAN MUTU DAN
KEAMANAN PANGAN



SUHARSO, SP., M.Si
Pembina
NIP. 19690302 199103 1 010

Pihak Pertama,
KETUA KELOMPOK KERJA PENGUJIAN
PANGAN



SUHARSO, SP., M.Si
Pembina
NIP. 19690302 199103 1 010



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Gatot Subroto Komplek Tarubudaya Ungaran Telepon 024-6921972,6925554

Faksimile 024-6921997 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik dishanpan@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DHANI SARDONO WIYOTO, S.TP., M.M.

Jabatan : Plt. Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPMKP

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SUHARSO, S.P., M.Si.

Jabatan : Plt. Kepala Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ungaran, 01 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Plt. KEPALA BALAI PENINGKATAN MUTU
DAN KEAMANAN PANGAN

SUHARSO, S.P., M.Si.

Pembina

NIP. 19690302 133103 1 010

Pihak Pertama,
Plt. KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
BALAI PENINGKATAN MUTU DAN
KEAMANAN PANGAN

DHANI SARDONO WIYOTO, S.TP., M.M.

Penata Tingkat I

NIP. 19801017 202001 1 004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Pit. KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA BPMKP

No	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Tersedianya dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada BPMKP	1 Dokumen
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen
2.	Terlaksananya layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada BPMKP	100%
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Paket
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 Paket
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 Paket
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan
3.	Tersedianya unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah pada BPMKP	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada BPMKP	4 Unit
		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	4 Unit

No	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
4.	Tersusunnya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada BPMKP	24 Laporan
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan
5.	Terpeliharanya unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada BPMKP	13 Unit
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	12 Unit

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
A. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 40.000.000	APBD
1. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp 40.000.000	APBD
B. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 40.086.000	APBD
1. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 9.300.000	APBD

Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
2. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	8.000.000	APBD
3. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	4.810.000	APBD
4. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp	5.976.000	APBD
5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	12.000.000	APBD
C. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	36.500.000	APBD
1. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	36.500.000	APBD
D. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	348.500.000	APBD
1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	186.000.000	APBD
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	162.500.000	APBD
E. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	179.710.000	APBD

Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	100.000.000	APBD
2. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	79.710.000	APBD

Ungaran, 01 Oktober 2025

Plt. KEPALA BALAI PENINGKATAN MUTU DAN
KEAMANAN PANGAN



SUHARSO, S.P., M.Si.

Pembina

NIP. 19690302 133103 1 010

Plt. KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
BALAI PENINGKATAN MUTU DAN
KEAMANAN PANGAN



DHANI SARDONO WIYOTO, S.TP., M.M

Penata Tingkat I

NIP. 19801017 202001 1 004



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Gatot Subroto Komplek Tarubudaya Ungaran Telepon 024-6921972,6925554

Faksimile 024-6921997 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik dishanpan@jatengprov.go.id

RENCANA KINERJA TAHUNAN

DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN : 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Sasaran 1			
1.1	Meningkatkan Keterjangkauan / Akses Pangan	Persentase Penanganan Kecamatan Rawan Pangan	6 %
		Rata-rata Deviasi Harga Pangan Strategis (Beras)	10 %
1.2	Meningkatkan Pemanfaatan Pangan	Skor PPH Provinsi	94,6
1.3	Meningkatkan Ketersediaan Pangan	Angka Kecukupan Energi	3.801 kkal/kap/hari
Sasaran 2			
2.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	83
2.2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko	3

Semarang, Januari 2024

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH



Ir. DYAH LUKISARI, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19661016 199203 2 006